



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 51 Desember 2024



100 HARI KERJA LEMHANNAS RI



Versi Digital

Seputar Kita

Selamat Datang Dr. H. TB.
Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Profil Pejabat

Brigjen Pol. Drs. I Gede Mega Suparwitha,
M.Si: "...berusaha menjadi baik, bahkan
dalam keadaan terburuk, bukan mengejar
pengakuan, tapi menjadi versi terbaik diri
sendiri..."

Opini

Relevansi Ketahanan Nasional
dalam Tata Kelola
Pemerintahan



Selamat dan Sukses

Atas Pelantikan

**PRABOWO SUBIANTO DAN
GIBRAN RAKABUMING RAKA**



**SEBAGAI PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2024-2029**



PELINDUNG ACE HASAN SYADZILY

PEMBINA EKO MARGIYONO

PENGARAH R. Z. PANCA PUTRA S.

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

DANI WARDHANA

REDAKTUR HENDRA SETIAWAN

PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO,

CAHYAQADRI HILDAMONA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER ANGGA MITRA TAMA

SEKRETARIAT MAGISTA DIAN FITRILIA, GATOT, AIDHA

SAHLA ADIWIDYA, DWI ARIYANI, DEANNISA SAVITRI

PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH,

NAOMI AUGUSTINA, SUCITRA PUTERI RACHMAN

ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI

JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR

LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI

DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 51, Desember 2024 telah terbit di tengah-tengah kita. Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan dalam berbagai rubrik. Diharapkan berbagai sajian informasi dalam Majalah Swantara ini dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Untuk Laporan Utama pada edisi kali ini, dibahas terkait 100 Hari Kerja Lemhannas RI di bawah kepemimpinan Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan kembali peran penting Lemhannas sebagai lembaga strategis yang menopang kepemimpinan nasional dan ketahanan negara di tengah kompleksitas tantangan nasional dan global.

Pada rubrik Seputar Kita, kali ini kami menyajikan informasi terkait ide, gagasan, dan informasi terkait Jakarta Geopolitical Forum yang berlangsung untuk yang kedelapan kali. Sementara rubrik profil mengangkat profil pejabat Lemhannas RI yang baru saja dilantik dan pegawai yang menjadi teladan di Lemhannas RI sehingga bisa mengenal lebih dekat dan menjadi inspirasi bagi pembaca. Selain itu, tim redaksi juga menyajikan berbagai rubrik seperti Hot News dan Ragam yang bisa menjadi pilihan referensi untuk menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan adanya saran dan masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya.

Tim redaksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 51, Desember 2024. Semoga, Majalah Swantara bisa memberikan banyak manfaat serta berkesan di hati para pembaca. *Grandescunt aucta labore!*

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namu Buddhaya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA 100 Hari Kerja Lemhannas RI

SEPUTAR KITA



12 Stephane Mechaty Tekankan Pentingnya Kerja Sama Uni Eropa dan Indo-Pasifik

13 Sekjen ASEAN bahas Sengketa Maritim dan Ketegangan Regional, Laut yang Menyatukan dan Memecahkan

14 Kerja Sama Kekuatan Menengah untuk Menghadapi Tantangan Global

15 Dukung Inovasi Maritim dengan IORIS, Solusi untuk Keamanan Maritim



16 Pertamina International Shipping Fokuskan Pengurangan Emisi CO2 dalam Industri Maritim

17 Pengembangan Teknologi Canggih untuk Tingkatkan Keamanan Industri Maritim

18 Maersk Line Targetkan Dekarbonisasi Total Rantai Pasokan pada 2040

19 India dan Indo-Pasifik, Sebuah Perspektif Strategis



20 Rusia Luncurkan Doktrin Maritim Baru untuk Menghadapi Dinamika Geopolitik Global

21 Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma Tegaskan Indonesia Berkomitmen terhadap Prinsip Poros Maritim Dunia

22 Erik Van Der Veen Bongkar Jaringan Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, dari Perairan ke Pengadilan

23 ICRC Soroti Dampak Kemanusiaan Perang di Laut dan Teknologi Perang Baru

SEPUTAR KITA



- 24 Laksamana (Purn.) Sudarshan Shrikhande Paparkan Tantangan Kerjasama Keamanan Maritim di Masa Depan
- 26 Tiga Tantangan Pengelolaan Potensi Laut China Selatan
- 28 Strategi Pertahanan Indonesia dalam Perlindungan Kawasan Maritim

- 29 Waka BRIN: Keamanan Maritim adalah Kepentingan Bersama
- 30 Selamat Datang Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
- 32 Gubernur Lemhannas RI Beri Arahan Di Kegiatan Pemanapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPD RI Periode 2024-2029

- 34 Relevansi Ketahanan Nasional Dalam Tata Kelola Pemerintahan
- 36 Wilayah Laut dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Wawasan Nusantara
- 38 Potensi malapetaka persaingan Strategis China-AS di Kawasan Indo-Pasifik, Siapkah Indonesia menghadapinya?

PROFIL PEJABAT

40 **Brigjen Pol. Drs. I Gede Mega Suparwitha, M.Si:** "... berusaha menjadi baik, bahkan dalam keadaan terburuk, bukan mengejar pengakuan, tapi menjadi versi terbaik diri sendiri..."

PROFIL PEGAWAI

44 **Linda Asiri:** Dedikasikan Diri sebagai PNS, Seimbangkan Peran sebagai Istri dan Ibu

HOT NEWS



- 46 Indonesia Mitra Potensial Baru BRICS
- 47 Alumni LPDP Bebas Berkarya di Mana Saja

RAGAM



- 48 Ponot, Air Terjun Tertinggi di Indonesia
- 49 Larungan Ponorogo: Ketika Kepercayaan dan Alam Bersatu

SUARA PESERTA



- 50 Kolonel Marinir Rommy Hutagaol, M. Han., M.Tr. Opsla; "...tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena segala usaha pasti akan menghasilkan keberhasilan..."
- 51 Brigjen TNI Aditya Nindra Pasha : "... mulai berpikir dalam skala nasional, dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional"



52 GALLERY



100 HARI KERJA LEMHANNAS RI

Di awal masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan kembali peran penting Lemhannas sebagai lembaga strategis yang menopang kepemimpinan nasional dan ketahanan negara di tengah kompleksitas tantangan nasional dan global. Dalam keterangan persnya usai pelantikannya pada Selasa 22 Oktober 2024 di Istana Negara, Dr. Ace Hasan menggarisbawahi pentingnya komitmen Lemhannas sebagai “think tank” utama negara, sebuah lembaga yang tidak hanya bertugas melakukan kajian strategis, tetapi juga memberikan masukan kebijakan yang tepat sasaran kepada Presiden dan pemerintahan terkait isu-isu geopolitik, keamanan nasional, dan dinamika ekonomi global.

Dr. Ace Hasan menekankan bahwa Lemhannas harus memandu para pemimpin nasional agar dapat berjalan searah menuju cita-cita bangsa, memperkokoh pemahaman kebangsaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap isu-isu strategis nasional. Ia menyampaikan bahwa Lemhannas memiliki kewajiban untuk terus memberikan kontribusi melalui pemikiran-pemikiran yang tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mampu melihat peluang dan ancaman yang mungkin muncul di masa mendatang. “Kami punya kewajiban memberikan masukan sebagai lembaga think tank,” ujarnya, menegaskan peran Lemhannas dalam menyediakan perspektif strategis yang kuat.

Lebih lanjut, Dr. Ace Hasan menekankan pentingnya peran Lemhannas dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya menjaga ketahanan nasional. Di tengah arus globalisasi yang membawa pengaruh besar terhadap masyarakat dan identitas bangsa, Lemhannas memikul tanggung jawab untuk meneguhkan nilai-nilai luhur bangsa di berbagai lapisan masyarakat. Pemantapan ini bukan hanya sekedar seruan, tetapi langkah nyata melalui program pendidikan kebangsaan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Ia berharap dengan dukungan penuh masyarakat, Lemhannas RI dapat mewujudkan misinya dalam membangun Indonesia yang lebih kokoh, berdaya saing, dan tangguh di tengah percaturan dunia yang semakin kompetitif dan dinamis.

Hal ini menjadi langkah awal dari berbagai program yang akan digulirkan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, di mana Lemhannas akan terus mengukuhkan posisinya sebagai pilar strategis bangsa untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang di masa depan. Program 100 hari kerja ini juga telah disampaikan secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI pada Rabu 13 November 2024 lalu.

Pendidikan Pemimpin Nasional: Menyiapkan Kader Pimpinan Nasional Masa Depan

Sebagai bagian dari program 100 hari pertamanya, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menetapkan pendidikan bagi calon pemimpin nasional sebagai prioritas utama. Program pendidikan pimpinan tingkat nasional ini dirancang untuk membentuk pemimpin yang memiliki pemahaman komprehensif dan responsif terhadap tantangan masa depan, dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Melalui tema ini, dapat dipastikan bahwa setiap peserta didik memahami tantangan pembangunan nasional sekaligus dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam program ini, kurikulum yang digunakan mengalami pembaruan signifikan, dengan pendekatan

yang semakin relevan terhadap dinamika masyarakat. Kurikulum baru dirancang untuk lebih berbasis pada masyarakat, memungkinkan calon pemimpin untuk mengaplikasikan konsep kepemimpinan nasional dalam konteks nyata di masyarakat. Para peserta akan diperkenalkan dengan Strategi Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), yang menitikberatkan pada pemahaman kondisi lokal maupun internasional. SSDN menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pengembangan solusi yang sesuai dengan karakteristik lokal, sementara SSLN memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis situasi geopolitik global, membantu peserta memahami pengaruh dinamika internasional terhadap stabilitas nasional.

Selain itu, kurikulum ini juga mencakup simulasi situasi geopolitik yang dirancang untuk melatih calon pemimpin dalam merespons tantangan geopolitik dengan cara yang terukur dan strategis. Simulasi ini para peserta dihadapkan dengan skenario-skenario geopolitik dunia yang sedang berkembang, mulai dari rivalitas antarnegara, isu-isu lainnya lintas batas negara seperti keamanan energi, pangan, dan perubahan iklim. Dengan pendekatan praktis ini, peserta didik diharapkan dapat membangun kemampuan analitis yang tajam serta memiliki kesigapan dalam mengambil keputusan strategis di bawah tekanan.

Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas akademik dan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter kepemimpinan yang kuat, beretika, dan berintegritas. Melalui berbagai elemen pendidikan yang terintegrasi ini, diharapkan dapat melahirkan kader-kader pemimpin nasional yang memiliki wawasan luas, siap menghadapi tantangan global, dan mampu membangun masa depan Indonesia yang sejahtera dan tangguh di kancah internasional.

Kajian Strategis: Menghadapi Dinamika Geopolitik dan Tantangan Nasional

Saat ini, Lemhannas RI menempatkan kajian strategis sebagai elemen utama dalam merespons tantangan nasional dan global yang semakin kompleks. Sebagai lembaga think tank pemerintah, Lemhannas berfokus pada isu-isu

krusial yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan ketahanan nasional, seperti dinamika geopolitik, ketahanan pangan, serta hilirisasi ekonomi. Isu-isu ini tidak hanya penting bagi pertahanan nasional, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan posisi Indonesia di arena internasional.

Di bidang geopolitik, Lemhannas secara intensif mengkaji perubahan tatanan global, seperti pergeseran kekuatan dari unipolar menuju multipolar, yang mengubah peta hubungan antarnegara. Fenomena seperti meningkatnya rivalitas antara kekuatan adidaya, konflik yang berkepanjangan di beberapa kawasan, serta kebangkitan aliansi baru, menjadi fokus kajian Lemhannas. Pemahaman terhadap isu ini dianggap krusial, karena setiap perubahan dalam geopolitik global dapat membawa implikasi signifikan bagi stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia, termasuk dampaknya terhadap investasi, hubungan perdagangan, dan kebijakan luar negeri.

Selain itu, ketahanan pangan juga menjadi prioritas dalam kajian Lemhannas, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi besar menghadapi tantangan serius di sektor ini. Ketahanan pangan yang kuat adalah fondasi dari ketahanan nasional yang stabil, sehingga kajian terkait strategi pemenuhan kebutuhan pangan, swasembada, serta pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan menjadi sangat relevan. Lemhannas mengkaji dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta ketergantungan impor sebagai isu yang harus diatasi dengan segera, demi menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Kajian Lemhannas juga meliputi hilirisasi ekonomi, sebuah strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk sumber daya alam di dalam negeri. Hilirisasi dianggap penting dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah serta menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri. Lemhannas memberikan rekomendasi tentang bagaimana hilirisasi dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional sebagai strategi penguatan ekonomi dan ketahanan nasional yang lebih mandiri.

Lemhannas berperan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden



jangka panjang, menyesuaikan dengan dinamika geopolitik dan prioritas ekonomi nasional. Rekomendasi ini mencakup usulan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global, sekaligus melindungi kepentingan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berdaulat. Dalam beberapa bulan pertama, Lemhannas akan melaksanakan kajian mendalam yang hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan politik yang tangguh serta berdaya saing tinggi di tingkat global.

Mnyinggung dinamika geopolitik, Lemhannas memiliki ajang Jakarta Geopolitical Forum (JGF) sejak 2017. Berbagai isu geopolitik yang kompleks dari berbagai belahan dunia, telah mewarnai forum geopolitik ini selama sewindu pelaksanaannya. JGF tahun ini yang mengangkat tema “Addressing Geo-Maritime Resilience Challenges in The Indo-Pacific” atau “Menangani Tantangan Ketahanan Geomaritim di Indo-Pasifik,” tidak hanya sekadar ajang diskusi, namun juga menjadi arena strategis untuk menggalang konsensus kawasan. Indo-Pasifik saat ini berada di bawah tekanan persaingan geopolitik yang intens. Ketergantungan global terhadap kawasan ini, baik dari segi ekonomi maupun keamanan, membuat ketidakstabilan di Indo-Pasifik dapat berdampak luas pada tatanan dunia. Bagi Indonesia, yang selama ini mengambil peran aktif

di ASEAN dan memiliki garis pantai terpanjang di kawasan, isu ketahanan geomaritim bukan hanya soal keamanan, tetapi juga masa depan ekonomi dan kedaulatan.

Melalui kajian-kajian strategis ini, Lemhannas di bawah Dr. Ace Hasan tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi sebagai penggerak yang mendorong lahirnya kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan nasional dan internasional yang terus berkembang.

Penguatan Nilai Kebangsaan: Lemhannas Goes to Campus dan Program Pelatihan

Dalam upaya menjaga ketahanan nasional di tengah arus globalisasi, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menempatkan pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai salah satu pilar utama program 100 hari Lemhannas RI. Menyadari pentingnya membangun karakter bangsa yang kokoh, Lemhannas meluncurkan serangkaian inisiatif strategis, termasuk program Training of Trainers (ToT) dan Lemhannas Goes to Campus, untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila dan kebangsaan dapat tertanam kuat di berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

Program Training of Trainers (ToT) dirancang untuk mencetak para pelatih yang akan menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pemahaman

kebangsaan. Dengan melatih individu-individu yang memiliki potensi untuk menginspirasi dan menggerakkan masyarakat, Lemhannas memastikan bahwa pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat menjangkau seluruh lapisan, dari pusat hingga daerah. Untuk memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas sosialisasi ini, Lemhannas juga mengembangkan pendekatan berbasis algoritma yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini. Melalui optimalisasi teknologi algoritma, pesan-pesan kebangsaan yang disampaikan lebih relevan dan tepat sasaran, sehingga mampu menarik perhatian generasi digital.

Selain pelatihan berbasis teknologi, Lemhannas meluncurkan program Lemhannas Goes to Campus sebagai upaya mendekatkan nilai-nilai kebangsaan kepada kalangan mahasiswa dan pemuda. Generasi muda, sebagai penerus bangsa, dipandang perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan kebanggaan terhadap identitas nasionalnya. Program Goes to Campus ini mengadakan sesi dialog kebangsaan, seminar, dan diskusi interaktif di berbagai kampus untuk memperkaya wawasan mahasiswa tentang Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika dalam konteks tantangan modern. Melalui interaksi langsung dengan para pakar dan praktisi Lemhannas, mahasiswa diajak

untuk memahami pentingnya ketahanan nasional dan kontribusi mereka dalam mempertahankannya.

Dengan inisiatif ini, Lemhannas tidak hanya menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga berupaya menciptakan multiplier effect yang lebih luas melalui agen-agen perubahan di kampus dan komunitas. Dr. Ace Hasan berharap, melalui ToT dan Lemhannas Goes to Campus, generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam memelihara dan memperkuat karakter kebangsaan yang akan menjadi fondasi ketahanan nasional di masa mendatang.

Pengembangan Sistem Indeks Ketahanan Nasional yang Terukur

Lemhannas RI tengah mengembangkan sistem Indeks Ketahanan Nasional yang dapat memberikan pengukuran kondisi ketahanan nasional secara objektif dan terukur. Di era yang penuh ketidakpastian global, memiliki indikator ketahanan nasional yang akurat adalah kebutuhan mendesak, agar pemerintah dapat menilai tingkat kerawanan serta kekuatan nasional secara komprehensif dan responsif. Oleh karena itu, Lemhannas berfokus pada penataan ulang metodologi dan pembaruan variabel dalam indeks ketahanan nasional ini agar mencerminkan perkembangan terkini dan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi stabilitas negara.

Dalam pengembangan indeks ini, Lemhannas memperbarui metodologi pengukuran dengan menambahkan variabel-variabel yang relevan dengan situasi saat ini, termasuk ancaman digital, ketahanan pangan, dan aspek geopolitik yang kian kompleks. Variabel-variabel ini diukur menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, yang hasilnya dikumpulkan melalui riset mendalam dan data lapangan dari seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang mencerminkan kondisi aktual, yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang ketahanan Indonesia di berbagai aspek, dari politik, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan.

Indeks Ketahanan Nasional ini diharapkan menjadi barometer bagi kondisi ketahanan bangsa yang selalu up-to-date. Dengan adanya data yang akurat dan relevan, pemerintah dapat segera mengidentifikasi

kelemahan dan potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Selain itu, indeks ini juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah terkait ketahanan nasional, di mana setiap perubahan dalam indeks dapat menjadi petunjuk bagi pemerintah untuk menyesuaikan atau memperkuat kebijakan-kebijakan tertentu.

Sistem indeks yang dikembangkan Lemhannas tidak hanya dirancang untuk digunakan secara internal, tetapi juga berperan sebagai masukan strategis bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Dr. Ace Hasan berharap bahwa hasil dari pengukuran ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang strategis dan tepat sasaran. Dengan barometer ketahanan nasional yang dapat diandalkan, Indonesia akan lebih siap dalam merespons tantangan serta ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, guna menjaga stabilitas dan keamanan nasional yang berkelanjutan.

Penguatan Kelembagaan Lemhannas RI

Memperkuat peran strategisnya sebagai lembaga yang membina ketahanan nasional, Lemhannas RI di bawah kepemimpinan Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., berkomitmen untuk memperkuat fondasi kelembagaan melalui pembaruan regulasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman. Salah satu langkah awal yang dicanangkan adalah penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2016 yang mengatur fungsi dan kewenangan Lemhannas. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas Lemhannas dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, Lemhannas juga berencana mengusulkan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Nasional, yang pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2020 namun belum disahkan. RUU ini dirancang untuk memperkuat landasan hukum ketahanan nasional Indonesia, sekaligus menetapkan Lemhannas sebagai lembaga dengan

mandat yang lebih luas dan kekuatan hukum yang lebih kuat. Dengan regulasi yang lebih kokoh, Lemhannas akan mampu mengkoordinasikan kebijakan dan program yang mendukung ketahanan nasional, serta memperkuat sinergi dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lembaga-lembaga lainnya.

Di sisi operasional, Lemhannas telah merencanakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Pembaruan struktur internal dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi prioritas utama, agar Lemhannas menjadi lembaga yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika geopolitik modern. Penerapan sistem kerja berbasis digitalisasi juga tengah diupayakan, guna meningkatkan kecepatan dalam pengumpulan dan analisis data strategis. Dengan adanya dukungan teknologi, Lemhannas dapat memperkuat kapasitas pemantauan dan evaluasi secara real-time terhadap kondisi ketahanan nasional.

Langkah-langkah penguatan kelembagaan ini diharapkan mampu menjadikan Lemhannas lebih solid dan siap menghadapi tantangan baru, seperti ancaman siber, persaingan ekonomi global, dan dampak perubahan iklim terhadap keamanan nasional. Dr. Ace Hasan menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ini adalah investasi penting untuk memastikan Lemhannas tetap relevan dan dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan kontribusi nyata dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

Prioritas Isu dan Strategi Lemhannas dalam Rangkaian Program Asta Cita Presiden

Sebagai lembaga strategis negara, Lemhannas RI memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu delapan agenda prioritas yang menjadi arah kebijakan nasional. Di bawah arahan Gubernur Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Lemhannas berkontribusi dalam berbagai aspek Asta Cita Presiden, mulai dari reformasi politik dan birokrasi hingga penguatan ideologi Pancasila, serta mendukung pembangunan berkelanjutan

● LAPORAN UTAMA

yang berlandaskan pada ketahanan nasional.

Salah satu pilar utama Asta Cita yang menjadi fokus Lemhannas adalah reformasi politik dan birokrasi. Dalam mendukung upaya ini, Lemhannas melakukan kajian strategis mengenai reformasi kebijakan dan peningkatan efektivitas birokrasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hasil kajian ini digunakan untuk memberikan masukan kepada Presiden dalam menyusun kebijakan reformasi politik yang berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan publik. Lemhannas juga terus berupaya memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi ideologi bangsa, melalui program pendidikan dan sosialisasi yang menargetkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

Lemhannas juga memberikan dukungan nyata terhadap agenda swasembada pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional. Program kajian ketahanan pangan Lemhannas mengidentifikasi strategi untuk mencapai kemandirian pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis pangan global. Selain itu, Lemhannas turut mengkaji langkah-langkah swasembada energi yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, dan angin, yang tidak hanya menopang kebutuhan nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Hasil kajian ini disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan dalam merancang program-program berkelanjutan di sektor pangan dan energi.

Dalam mendukung Asta Cita lainnya, Lemhannas berkomitmen pada agenda penguatan ekonomi hijau, yaitu pembangunan ekonomi yang selaras dengan lingkungan dan bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Melalui berbagai kajian, Lemhannas memetakan potensi ekonomi hijau yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Program ini juga sejalan dengan target pembangunan Indonesia untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon, di mana Lemhannas memainkan peran dalam menyarankan kebijakan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) nasional menjadi perhatian besar Lemhannas dalam mendukung Asta Cita. Dengan berbagai program pendidikan pimpinan dan pelatihan nilai kebangsaan, Lemhannas berupaya menghasilkan pemimpin-pemimpin berintegritas yang mampu memajukan bangsa dalam berbagai sektor. Program ini difokuskan pada peningkatan kompetensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan yang mengakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, kebhinnekaan, dan persatuan.

Melalui kontribusi dan kajian strategis dalam mendukung agenda Asta Cita Presiden, Lemhannas di bawah kepemimpinan Dr. Ace Hasan berharap dapat memperkuat ketahanan nasional yang berkelanjutan. Sinergi antara program Asta Cita dengan kebijakan strategis Lemhannas diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang sejahtera, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional.

Harapan dan Tantangan Gubernur: Membawa Lemhannas RI ke Tingkat Selanjutnya

Di akhir program 100 hari, perlu adanya refleksi langkah-langkah yang telah diambilnya sebagai Gubernur Lemhannas RI, sambil mengidentifikasi tantangan serta peluang yang akan dihadapi ke depan. Dalam kepemimpinannya, Dr. Ace Hasan telah berfokus pada penguatan peran strategis Lemhannas sebagai lembaga yang mendukung ketahanan nasional dan siap beradaptasi di tengah dinamika global. Sebagai lembaga think tank utama negara, Lemhannas dituntut untuk terus menghadirkan kajian dan rekomendasi yang bukan hanya tanggap terhadap perubahan zaman, tetapi juga selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Dr. Ace Hasan menyadari bahwa di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi, ketahanan nasional harus terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa. Tantangan global yang kompleks, seperti persaingan ekonomi, perubahan iklim, dan ancaman siber, mengharuskan Lemhannas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang adaptif dan inovatif. Ia menekankan bahwa ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah,

tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan serta kedaulatan Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan keterlibatan generasi muda, Lemhannas berkomitmen untuk mengembangkan program-program yang dapat memperkuat karakter bangsa di era digital.

Ke depan, membangun kapasitas Lemhannas dipandang sangat penting dalam menghadirkan solusi-solusi strategis yang mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045, sebuah visi yang tidak hanya mencakup pencapaian kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga penguatan karakter bangsa. Diharapkan, Lemhannas dapat terus berinovasi dalam memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan ini, dengan mengedepankan pendidikan kepemimpinan, kajian strategis, dan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk Indonesia Emas 2045, Dr. Ace Hasan juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antarinstansi dan meningkatkan literasi kebangsaan di berbagai kalangan masyarakat. Melalui pendekatan-pendekatan baru yang beradaptasi dengan kebutuhan era digital, Lemhannas berupaya memperkuat fondasi ideologis dan ketahanan sosial Indonesia. Harapannya, sinergi antara lembaga negara, sektor swasta, dan komunitas masyarakat akan semakin solid, sehingga tantangan global dapat dihadapi dengan lebih tangguh.

Dr. Ace Hasan optimistis bahwa, dengan komitmen yang kuat dan dukungan seluruh elemen bangsa, Lemhannas akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan berdaya saing, selaras dengan tujuan besar menuju Indonesia Emas 2045.



Lemhannas RI Hasilkan

2.057

AGEN PERUBAHAN

Melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Pada Periode Triwulan I - III
Tahun Anggaran 2024



188
PELAJAR

20
TNI

5
POLRI



46
TOKOH
MASYARAKAT

525
AKADEMISI



152
SENATOR

75
APARATUR
PEMERINTAH



275
ANGGOTA DPR



771 APARATUR
NON PEMERINTAH

Stephane Mechaty Tekankan Pentingnya Kerja Sama Uni Eropa dan Indo-Pasifik

Di kawasan Indo-Pasifik, Uni Eropa memiliki peran yang vital. Pembicara pertama pada sesi pertama yang bertema "Geopolitics and Maritime Whole of Government in the Region" di JGF VII, Mr. Stephane Mechaty, mengatakan bahwa Uni Eropa telah menjadi investor utama, penyedia kerja sama pembangunan utama, dan salah satu mitra perdagangan terbesar. Sekitar sepertiga perdagangan luar negeri Eropa juga transit melalui Laut Cina Selatan sehingga kawasan Indo Pasifik sejatinya sangat penting bagi Uni Eropa.

Charge d'affaires EU Delegation to Indonesia ini kemudian menuturkan bahwa Wakil Presiden Komisi Eropa HR/VP Josep Borrell telah menyampaikan bahwa saat ini, semua hidup dalam kesatuan keamanan. Ketegangan di titik-titik panas sebuah kawasan dapat berdampak pada stabilitas dan kesejahteraan negara lain. "Sebelumnya, bidang keamanan tidak pernah sangat saling terkait seperti ini," tutur Mechaty.

Adanya persaingan geopolitik yang semakin ketat di kawasan Indo-Pasifik serta kendala dan tantangan yang timbul dari adanya potensi ketidakstabilan di kawasan tersebut menimbulkan dampak yang luas bagi Eropa secara ekonomi dan politik. "Hal tersebut menimbulkan dampak dan konsekuensi bagi hubungan Uni-Eropa dengan Indo-pasifik," jelas Mechaty.

Uni Eropa menilai strategi Indo-Pasifik sebagai cara untuk menciptakan peluang baru, ketahanan dan stabilitas. Maka dari itu, menjalin kerja sama dengan Indo-Pasifik saat ini merupakan hal yang sangat relevan. Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Belanda, republik Ceko, dan Lithuania juga telah mengadopsi strategi Indo-Pasifik.

"Uni Eropa telah meningkatkan keterlibatannya di kawasan Indo-Pasifik dan bertujuan untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka bagi semua orang sembari membangun Kemitraan yang kuat dan efektif. seperti Indonesia, pendekatan Uni Eropa terhadap kawasan Indo-Pasifik adalah kerja sama, bukan konfrontasi. Baik Indonesia maupun kami, bertujuan untuk memperkuat Kemitraan dengan negara-negara

di kawasan Indo-Pasifik. Baik Uni Eropa maupun Indonesia berkomitmen untuk memelihara dan melakukan dialog serta terus menghindari adanya pembentukan blok," jelas Mechaty.

Mechaty kemudian menyebutkan bahwa tata kelola laut harus sepenuhnya mematuhi hukum internasional terutama konvensi PBB tentang hukum laut untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dan melaporkan penangkapan ikan yang tidak diatur atau disebut dengan IUU, menerapkan perjanjian penangkapan ikan yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola digital, infrastruktur digital, keamanan siber, perdagangan digital, pengembangan keterampilan digital, hingga melaksanakan dialog reguler.

Uni Eropa dan Indo Pasifik juga berkomitmen untuk menjaga ketertiban internasional berdasarkan aturan dan kebebasan navigasi di kawasan khususnya yang berkaitan dengan jalur perdagangan bebas dan keamanan Maritim. "Kita ingin melindungi kepentingan kita masing-masing, namun kita juga ingin memastikan bahwa hukum internasional berlaku khususnya di wilayah maritim," jelas Mechaty.

Kawasan Indo-Pasifik telah muncul sebagai pusat persaingan politik yang baru. Meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan Timur, di Selat Taiwan, agresi militer ilegal Rusia dan perang melawan Ukraina, perkembangan

buruk di Timur Tengah di Palestina dan di Lebanon, di Laut Merah, berdampak pada keamanan global dan berdampak langsung pada kemakmuran negara-negara Eropa dan Indo-Pasifik.

Uni Eropa dan Indo-Pasifik juga menghadapi tantangan, ancaman, dan kejahatan keamanan baru yang semakin kompleks dan multidimensi. Semua elemen saling seperti perubahan iklim, persaingan geopolitik, serangan siber, bahkan segala informasi, manipulasi dan campur tangan sangat berkaitan erat. Pendekatan Uni Eropa bertujuan untuk mengatasi ancaman dan tantangan kompleks dan mencari solusi komprehensif untuk sebuah pendekatan pemerintah secara menyeluruh dengan mitra Internasional.

Mechaty juga menekankan pentingnya mengatasi masalah tradisional seperti perompakan, perampokan bersenjata di laut, dan serangan siber. Mengenai isu-isu maritim, Uni Eropa juga telah mengembangkan kerangka kebijakan yang melindungi kepentingan Uni Eropa di laut, melindungi perekonomian, infrastruktur, dan perbatasan Uni Eropa, serta menegakkan hukum internasional khususnya UNCLOS dengan bekerja sama dengan mitra terkait.

Prinsip-prinsip hukum internasional harus ditetapkan dan diterapkan bersama. Dialog inklusif dengan seluruh mitra Uni Eropa harus segera diimplementasikan dengan melibatkan seluruh pihak seperti institusi sipil, lembaga pendidikan, bahkan masyarakat melalui parlemen Eropa. Dengan 27 negara, uni eropa memiliki kemampuan dan keahlian luar biasa, sebut Mechaty. Namun, Uni Eropa harus tetap bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB, hingga organisasi regional seperti ASEAN. "Bekerja sama dengan mereka semua dalam semangat dialog, saling menghormati dan kemitraan yang akan mengarah pada proyek kerja sama yang sangat konkrit," tutup Mechaty.



Sekjen ASEAN bahas Sengketa Maritim dan Ketegangan Regional, Laut yang Menyatukan dan Memecahkan



Asia Tenggara dengan 66% wilayahnya berupa perairan merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam perdagangan global dan keberlanjutan ekonomi maritim. Laut-laut di kawasan ini menjadi jalur utama bagi perdagangan internasional, sumber daya alam, hingga potensi pariwisata yang besar. Namun, di balik potensi besar tersebut, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari konflik geopolitik, degradasi lingkungan, hingga ancaman keamanan maritim.

Salah satu tantangan paling signifikan adalah ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Konflik ini memperparah ketegangan geopolitik di kawasan ini hingga berisiko memicu eskalasi konflik. Laut Cina Selatan adalah salah satu kawasan sengketa terpanas di dunia, dengan negara-negara ASEAN dan Tiongkok terus bersaing dalam klaim wilayah dan mengancam stabilitas dan keamanan regional.

“Sengketa-sengketa ini masih belum terselesaikan dan menjadi semakin genting dengan meningkatnya risiko ketegangan dan eskalasi menjadi konflik terbuka. Jadi, meskipun laut menyatukan kita, laut juga memecah belah kita,” kata Secretary General of ASEAN, Dr. Kao Kim Hourn pada kegiatan sesi pertama hari pertama Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 di Jakarta (25/09).

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana Laut Cina Selatan menjadi pusat ketegangan di antara negara-negara yang terlibat dalam klaim teritorial. “Ketegangan yang terus meningkat di kawasan ini dapat mempengaruhi stabilitas jangka panjang di Asia Tenggara,” ucapnya.

Di luar ketegangan geopolitik, Asia Tenggara juga menghadapi tantangan

maritim lainnya yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah masalah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut di kawasan ini.

“Tantangan maritim di Asia Tenggara tidak hanya terkait dengan konflik wilayah, tetapi juga dengan masalah keberlanjutan lingkungan dan keamanan laut. Kita harus menghadapi masalah ini dengan pendekatan lintas sektoral dan terkoordinasi,” ucapnya.

“ASEAN juga perlu memperkuat sinergi antarnegara anggota untuk menghadapi tantangan-tantangan ini secara efektif,” tambahnya.

Degradasi lingkungan, termasuk polusi plastik di laut dan dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut juga menjadi ancaman besar bagi ekosistem laut di Asia Tenggara.

Untuk menangani tantangan-tantangan tersebut, ASEAN telah meluncurkan inisiatif, seperti ASEAN Maritime Outlook (AMO) pada tahun 2023. Inisiatif ini yang diprakarsai oleh Indonesia selama masa kepemimpinan ASEAN, bertujuan untuk memberikan panduan dan rekomendasi dalam menghadapi masalah-masalah maritim di kawasan.

“AMO adalah tonggak penting dalam upaya ASEAN untuk meningkatkan kerja sama maritim. Ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan yang kita hadapi, tetapi juga bagaimana kita dapat menghadapinya bersama,” ucapnya.

Kerja sama regional dan internasional sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan maritim Asia Tenggara. ASEAN secara aktif melibatkan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Tiongkok dalam dialog strategis untuk memastikan bahwa kawasan ini tetap damai dan aman. Platform seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Expanded ASEAN

Maritime Forum (EAMF) digunakan untuk mendorong dialog yang konstruktif di antara negara-negara yang berkepentingan.

“Kerja sama dengan negara-negara eksternal tidak hanya membantu dalam menjaga keamanan maritim, tetapi juga dalam mengatasi masalah-masalah lintas batas, seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan,” tambahnya.

Di tengah ketegangan yang terjadi, ASEAN tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa wilayah maritim secara damai. Penyelesaian damai atas sengketa maritim harus didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Pendekatan berbasis aturan hukum internasional ini, menurutnya sangat penting dalam mencegah eskalasi konflik di kawasan.

“Dialog yang kuat dan kerja sama praktis antara negara-negara di kawasan ini serta dengan mitra eksternal sangat penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Dalam menghadapi ketegangan yang meningkat, pendekatan berdasarkan aturan hukum internasional tetap menjadi landasan strategi kita,” tambahnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, ASEAN terus memperkuat upayanya untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat maritim yang damai dan sejahtera.

“Kita harus terus memperkuat kepercayaan strategis di antara negara-negara anggota dan mitra eksternal untuk mencegah eskalasi politik di masa mendatang,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, ASEAN yakin bahwa Asia Tenggara akan mampu menghadapi tantangan maritim yang kompleks dan tetap menjadi kawasan yang damai, aman, dan sejahtera bagi semua pihak.

Kerja Sama Kekuatan Menengah untuk Menghadapi Tantangan Global

Direktur Eksekutif Asia–Pacific Development, Diplomacy, and Defence Dialogue (APD4) Melissa Conley Tyler menyampaikan idenya tentang pentingnya peran kekuatan menengah dalam menghadapi masalah-masalah dunia melalui kerja sama lintas-pemerintahan dan lintas bangsa. Pidatonya disampaikan dalam sesi kesatu hari pertama Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 “Addressing Geo-Maritime Resilience Challenges in the Indo-Pacific” yang berlangsung pada (25/9) bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta.

Melissa Conley Tyler memaparkan proposisinya yang sederhana. Dalam dunia yang sulit, dibutuhkan kekuatan menengah dalam mengatasi tantangan global yang saling terhubung, dan untuk mencapainya diperlukan pendekatan lintas pemerintahan, bahkan lintas bangsa. Dalam pidatonya, perwakilan Australia menyimpulkan bahwa dunia saat ini penuh dengan tantangan yang saling terhubung, mulai dari keamanan, lingkungan, hingga hak asasi manusia. Tantangan-tantangan ini tidak mengenal batas negara atau pembagian departemen pemerintahan. Oleh karena itu, ia menyerukan kerja sama yang lebih erat antara negara-negara kekuatan menengah seperti Indonesia dan Australia, dengan pendekatan lintas-pemerintahan dan lintas-bangsa.

Ia menyampaikan rasa belasungkawa mendalam terhadap korban sipil di Lebanon yang tewas akibat konflik terbaru. “Inilah wujud dari dunia yang sulit,” katanya. Ia juga menyoroti berbagai krisis lainnya seperti perang di Ukraina dan Rusia, perang saudara di Myanmar, perubahan iklim yang mengakibatkan perpindahan warga di Kuba dan Tuvalu, serta konflik di Sudan. Menurutnya, ini adalah contoh nyata dari tantangan global yang harus dihadapi bersama.

Dalam pidatonya, Melissa Conley Tyler yang berasal dari Australia menyebut bahwa negaranya berada pada kekuatan menengah, mendorong tanggung jawab lebih untuk terlibat aktif dalam sistem internasional. “Kita bukan kekuatan besar yang bisa menyuap atau mengintimidasi

negara lain, tetapi kita memiliki kekuatan untuk berpengaruh, dan kita harus bekerja keras untuk membentuk sistem internasional dengan cara yang sesuai dengan kita,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kerja sama antara Australia, Indonesia, serta negara-negara kekuatan menengah lainnya seperti Meksiko, Korea Selatan, dan Turki. Kelompok ini secara rutin bertemu untuk membahas berbagai isu strategis selama lebih dari satu dekade terakhir. Dalam konteks inilah, ia menegaskan bahwa kekuatan menengah bisa lebih kuat jika mereka bersatu.

“Saya sangat senang Perdana Menteri Australia bertemu dengan Ibu Retno Marsudi dalam sebuah pertemuan di sela-sela kegiatan PBB. Ini adalah bagian dari bagaimana kekuatan menengah bisa bekerja sama, dan saat bekerja bersama, kita lebih kuat,” ujarnya.

Selain menyoroti peran kekuatan menengah, Melissa Conley Tyler juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan lintas pemerintahan dalam menghadapi tantangan global. Ia mengungkapkan bahwa isu-isu seperti perubahan iklim, keamanan maritim, dan konflik lintas negara memerlukan koordinasi yang kuat antar departemen dan lembaga di setiap negara. Di Australia, misalnya, lebih dari 20 lembaga terlibat dalam menangani isu-isu terkait keamanan maritim, dan situasi yang serupa mungkin terjadi di Indonesia.

“Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana membentuk pendekatan lintas pemerintahan yang efektif,” katanya. Ia menekankan pentingnya strategi lintas-pemerintahan yang jelas, di mana berbagai departemen pemerintah dapat bekerja selaras untuk mencapai tujuan bersama. “Negara-negara yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam melakukannya, tetapi yang penting adalah memastikan bahwa komunikasi antara departemen itu ada dan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga

menekankan pentingnya membekali staf pemerintah dengan kemampuan lintas budaya dan lintas sektor untuk memungkinkan komunikasi yang lebih baik di antara berbagai bidang yang berbeda. Dalam kasus ini, misalnya, Polisi Federal Australia telah memperluas peran mereka dalam keterlibatan internasional, dan para personelnya harus mempelajari keterampilan baru untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak dari budaya dan latar belakang yang berbeda.

Lebih jauh, Melissa Conley Tyler juga menekankan pentingnya pendekatan lintas bangsa yang melibatkan masyarakat sipil dan aktor-aktor non-pemerintah. “Masalah-masalah ini tidak peduli bagaimana kita membagi departemen pemerintahan kita, mereka tidak peduli tentang batas nasional kita. Tantangan ini ada di sana, dan kita harus menemukan cara untuk berkolaborasi secara internal maupun eksternal untuk menghadapinya,” pungkasnya, menutup pidato.





JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM VIII / 2024

*ADDRESSING GEO-MARITIME RESILIENCE CHALLENGE. IN THE IN

Industri pelayaran global menjadi salah satu tulang punggung perekonomian internasional, dengan lebih dari 90% perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut. Namun, tantangan keamanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan terus menjadi hambatan bagi sektor ini. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Uni Eropa melalui proyek Crimario telah mendanai pengembangan IORIS (Indo-Pacific Ocean Regional Information Sharing IT platform), sebuah platform berbagi informasi berbasis web yang berfungsi sebagai alat koordinasi untuk meningkatkan keamanan dan kolaborasi lintas batas di sektor maritim.

"IORIS adalah alat berbasis web yang netral dan aman yang mendukung konsolidasi domain maritim yang sangat terfragmentasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti para pemilik kapal, penyewaan kapal, otoritas keselamatan dan keamanan negara bendera kapal dan badan pengatur," kata Director of Crimario Project, Dr. Martin Ingloott pada kegiatan Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 di Jakarta (25/09).

Platform ini memberikan akses kepada lebih dari 100 organisasi dan entitas dari lebih dari 45 negara untuk berbagi informasi secara real-time. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan respons yang lebih cepat dalam menangani ancaman maritim, termasuk pembajakan dan perampokan bersenjata.

"IORIS memungkinkan perusahaan pelayaran, otoritas pemerintah, dan badan-badan ini dapat bertukar informasi dengan cara yang aman dan terbagi-bagi. Memastikan bahwa data yang sensitif secara komersial dilindungi," tambahnya.

Hal ini tidak hanya mendorong kolaborasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan, tetapi juga menciptakan rasa percaya bahwa data yang dibagikan tetap aman dan terlindungi, termasuk informasi penting mengenai keamanan kapal dan operasional.

Wilayah Indo-Pasifik, khususnya Samudera Hindia dan Laut Sulawesi, dikenal

JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM VIII/2024

Dukung Inovasi Maritim dengan IORIS, Solusi untuk Keamanan Maritim

sebagai zona dengan risiko tinggi terkait pembajakan dan perampokan bersenjata. Ancaman ini terus berkembang, di mana para pelaku kini semakin terorganisir dan canggih.

Untuk mengatasi masalah ini, IORIS menawarkan solusi nyata dalam bentuk peningkatan kesadaran situasional di antara angkatan laut, penjaga pantai, dan pelayaran komersial. Platform ini memungkinkan komunikasi secara rahasia dan real-time antara kapal perang dan kapal dagang sehingga mempercepat respons terhadap ancaman maritim.

"Mengurangi risiko pembajakan seperti yang telah kita lihat pada awal tahun ini, ketika platform ini digunakan secara ekstensif untuk berbagi informasi tentang ancaman pembajakan yang merekomendasikan koridor transit dan langkah-langkah perlindungan kapal," ucapnya.

Meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, industri pelayaran juga dihadapkan risiko serangan siber. IORIS dengan enkripsi canggihnya, memungkinkan pertukaran informasi yang aman antarpemangku kepentingan, memberikan jaminan bahwa data sensitif termasuk informasi komersial dan operasional tetap terlindungi.

Selain meningkatkan keamanan maritim, IORIS juga memainkan peran penting dalam mendukung operasi pencarian dan penyelamatan (SAR). Kapal-kapal yang mengalami kesulitan di laut sering kali sulit untuk mendapatkan bantuan segera karena jarak yang jauh dari Pusat Koordinasi Penyelamatan.

Dengan IORIS, pusat-pusat koordinasi penyelamatan di Samudera Hindia kini dapat bekerja sama secara lebih efisien, terutama di wilayah perbatasan pencarian dan penyelamatan regional.

IORIS bukan hanya alat yang bermanfaat bagi Uni Eropa, tetapi juga bagi seluruh negara di Indo-Pasifik yang bergantung pada keamanan dan kelancaran perdagangan maritim.

"Izinkan saya menggarisbawahi bahwa IORIS bukanlah sistem Uni Eropa tetapi sistem yang didanai Uni Eropa untuk kawasan ini karena kita semua mulai mendapatkan keuntungan dari rute perdagangan yang lebih aman dan lebih terjamin," tegasnya.

Dengan dukungan dari lebih dari 100 organisasi dan entitas, termasuk Angkatan Laut, Penjaga Pantai, dan otoritas kelautan di seluruh kawasan, IORIS diposisikan untuk terus memainkan peran penting dalam keamanan maritim global.

Crimario dan IORIS juga berperan penting dalam mendorong negara-negara di kawasan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan-tantangan maritim yang semakin kompleks. Masa depan IORIS diharapkan akan semakin cerah dengan semakin banyaknya negara dan entitas yang bergabung dalam komite pengarah dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan kebijakan dan operasi IORIS di masa mendatang.

"Platform ini menjadi bukti bahwa kolaborasi regional dapat membawa dampak signifikan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di laut," tutupnya.



1. Maritime Industry transporting more than 80% of world merchandise by volume



2. Maritime Industry increasing scrutiny over its environmental footprint demanding sustainable practices towards greener and cleaner future



3. Maritime Industry contributes 2.5% of global energy related CO2 emission

www.pertamina-pis.com

JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM VIII/2024

Pertamina International Shipping Fokuskan Pengurangan Emisi CO2 dalam Industri Maritim

Industri maritim mengangkut lebih dari delapan puluh persen barang di dunia. Industri maritim saat ini telah meningkatkan keamanan atas dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tersebut dan didorong untuk terus dilakukan demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Direktur Human Capital and Corporate Service Pertamina International Shipping (PIS) Surya Tri Harto menuturkan bahwa saat ini industri maritim menyumbang 2,5 persen emisi CO2 secara global. Jika ditambahkan dengan industri penerbangan, jumlah emisi CO2 bisa melebihi 2,5 persen tersebut. Sebagai perusahaan pelayaran dan logistik menengah terintegrasi, Pertamina International Shipping juga berkontribusi dalam pengurangan emisi CO2.

Sebagai sebuah integrated marine logistics company, PIS menawarkan holistic marine logistic service yang mencakup transportasi dari daerah asal ke tujuan, layanan maritim sebagai penghubung antara laut dan darat. PIS juga mengelola pelabuhan, kepemilikan aset pelabuhan, layanan pendukung lainnya seperti layanan uji coba.

Operasi yang dilakukan oleh PIS tidak hanya di tingkat nasional namun hingga seluruh dunia. Saat ini, PIS memiliki 63 armada yang beroperasi di seluruh dunia dengan setidaknya 60 rute internasional seperti indo-pasifik seperti Jepang, Korea, Papua Nugini, Fuji, Pulau Solomon dan negara-negara Afrika dan Amerika Selatan. Industri maritim, menurut Surya Triharto, menyumbang total 19-20 persen emisi CO2 di dunia.

IMO sudah memperkenalkan komitmen

Net Zero Emission target pada tahun 2015. PIS juga memiliki komitmen untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 dengan jalur hijau. PIS juga telah mendiskusikan inisiatif lingkungan hidup yaitu mengatasi perubahan iklim, mengurangi dampak lingkungan, dan melindungi keanekaragaman hayati.

PIS memiliki empat strategi keberlanjutan sebagai komitmen Net Zero Emission. Yang pertama adalah efisiensi pola operasional yang membahas mengenai cara mengurangi waktu tunggu di pelabuhan, pengurangan kecepatan kapal, optimalisasi pelayaran dalam hal konsumsi bahan bakar, manajemen kecepatan serta pemanfaatan kapasitas.

PIS juga memastikan desain kapal baru merupakan desain yang ramah lingkungan, serta membeli beberapa kapal dan memastikan kapal baru tersebut memiliki spesifikasi yang memenuhi ekspektasi PIS untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi CO2.

Selain itu, PIS juga memiliki inisiatif penggunaan bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi. Tahun lalu, PIS membeli kapal yang memiliki bahan bakar ganda yaitu bahan bakar minyak dan LNG sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengurangan emisi. Bahan bakar alternatif memberikan dampak yang lebih baik bagi lingkungan tetapi juga masih menjadi sebuah tantangan.

PIS juga memiliki ballast water treatment system dan Scrubber initiatives untuk mengurangi emisi Sox serta beberapa inisiatif penurunan emisi dengan desain kapal yang ramah lingkungan, pembatasan tenaga mesin, serta pembersihan

balancing dan lambung kapal. Hal ini merupakan sebuah inisiatif kecil namun memberikan kontribusi signifikan dalam misi pengurangan CO2.

Rencana PIS selanjutnya dalam pengurangan emisi CO2 yaitu dengan terus menggunakan kapal dan bahan bakar ramah lingkungan serta menciptakan pelabuhan yang dan kargo ramah lingkungan. Bersama dengan mitra strategis, PIS berkomitmen untuk mengelola bisnis carbon capture storage dan carbon capture utilization storage untuk memenuhi target pengurangan emisi CO2 PIS.

Di tahun 2023, PIS dapat mengurangi total sekitar 24,5 kilo ton Co2e (CO2 emission). di tahun 2030, PIS berharap dapat berkontribusi dalam pengurangan Co2 sebanyak 48,8 kilo ton per tahun yang berarti 32 persen lebih banyak dari pengurangan Co2 biasanya.

Di akhri paparan, Surya Triharto menekankan bahwa saat pengurangan Co2 menghadapi tantangan yang beragam seperti bahan bakar fosil yang relatif lebih murah masih menjadi pilihan utama dibandingkan dengan bahan bakar alternatif karena bahan bakar fosil yang relatif lebih murah. Maka dari itu yang menjadi tantangan adalah cara menurunkan biaya kepemilikan bahan bakar alternatif sehingga dapat setara dengan bahan bakar fosil. "Kita masih mengandalkan bahan bakar fosil namun kita perlu memastikan bahwa bahan bakar alternatif tersebut akan memberikan kontribusi yang lebih efisien," Pungkas Surya Triharto.

Pengembangan Teknologi Canggih untuk Tingkatkan Keamanan Industri Maritim

Business Development Manager at Scytalys–EFA Group, Jakub Similski mempresentasikan solusi inovatif untuk meningkatkan keamanan maritim dalam sesi kedua hari pertama Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 “Addressing Geo-Maritime Resilience Challenges in the Indo-Pacific” yang berlangsung pada (25/9) bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta.

Keamanan maritim kini menghadapi berbagai ancaman serius, seperti perompakan, terorisme maritim, perdagangan ilegal, dan persaingan geopolitik. Untuk menghadapi tantangan ini, teknologi memainkan peran sentral. Jakub Similski memaparkan solusi penggunaan teknologi yang melibatkan integrasi sistem tanpa awak, kecerdasan buatan (AI), serta pembelajaran mesin yang mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kewaspadaan domain maritim.

Jakub Similski menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dan integrasi data secara real-time guna mengatasi keterbatasan koordinasi yang sering terjadi dalam operasi keamanan maritim. Sistem yang ditawarkan adalah Universal Link System (ULS) dan Mission Information Management System (MIMS) yang dirancang untuk memastikan interoperabilitas, memungkinkan koordinasi yang mulus di antara berbagai lembaga keamanan maritim. “ULS memungkinkan pengiriman dan monitor data digital untuk informasi yang merata agar bisa diakses semua yg memerlukannya agar pengambilan keputusan bisa dibuat dengan cara lebih objektif dan reliable,” jelasnya.

dan disamping itu kami jg bs memberikan National Data Link, ini adalah suatu bahasa yg memungkinkan lembaga yg berbeda bisa saling berkomunikasi dalam bahasa yang sama dgn cara atau pd media yg aman secara real time”

Tidak hanya meningkatkan keamanan, Jakub Similski melalui Scytalys juga memperkenalkan teknologi yang berkontribusi terhadap keberlanjutan di sektor maritim. Teknologi navigasi otomatis dan kapal yang hemat bahan bakar, serta sistem pemantauan lingkungan, membantu industri ini mengurangi konsumsi sumber daya dan dampak lingkungan. Luasnya area yang harus diawasi dan dilindungi serta koordinasi yang terbatas di antara berbagai lembaga keamanan menjadi tantangan utama dalam menjaga keamanan maritim.

Selain itu, ancaman siber semakin menjadi perhatian utama, dengan insiden serangan siber yang dapat mengganggu operasi maritim. Untuk mengatasi masalah ini, Scytalys menawarkan solusi yang kuat, seperti sistem keamanan jaringan terpusat/ Network Security System (NSS) yang

dirancang untuk mencegah intrusi dan melindungi komunikasi di setiap titik operasi.

Sistem lain yang ditawarkan adalah solusi interoperabilitas yang mendukung kemampuan untuk berbagi data operasional secara aman dan real-time di seluruh struktur komando berbagai lembaga yang bergerak di bidang maritim. “Fokus pada membangun konektivitas di antara berbagai platform dan sistem, bahkan yang awalnya tidak dirancang untuk berkomunikasi satu sama lain untuk penggunaan militer dan keamanan. Tujuannya

untuk mengembangkan persyaratan dan standar untuk sistem masa depan, memastikan interoperabilitas dan mencapai interkoneksi di seluruh sistem dan domain,” jelas Jakub Similski.



Maersk Line Targetkan Dekarbonisasi Total Rantai Pasokan pada 2040



Foto. Unsplash

MAERSK LINE

Managing Director A.P. Moller Singapore Pte Ltd (Maersk Line Singapore) Rene Pii Pedersen, narasumber terakhir dalam plenary session II hari pertama Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 "Addressing Geo-Maritime Resilience Challenges in the Indo-Pacific" yang berlangsung pada (25/9) bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta.

Pedersen, menyampaikan komitmen kuat Maersk untuk mencapai dekarbonisasi penuh pada 2040. Berbicara dalam sesi plenary Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024, Pedersen menegaskan bahwa target tersebut mencakup seluruh rantai pasokan, bukan hanya di sektor perkapalan. Ia menyatakan bahwa meskipun sektor perkapalan menyumbang sekitar 2,5% emisi CO2 global, total emisi rantai pasokan bisa mencapai 10-11%. "Kami tidak hanya fokus pada pengiriman laut, tetapi juga terminal pelabuhan, pergudangan, truk, dan bahkan transportasi darat di berbagai negara," jelasnya.

Lebih lanjut Pedersen dengan penuh keyakinan tentang komitmen perusahaannya untuk berkontribusi terhadap kebaikan umat manusia, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Menurutnya, dekarbonisasi bukan hanya agenda perusahaan, tetapi juga tuntutan global yang datang dari setiap warga negara.

Pedersen menggambarkan betapa mendesaknya tantangan ini dengan merujuk pada pengalaman langsungnya menyaksikan dampak cuaca ekstrem. "Saya baru saja tiba dari Vietnam pagi ini. Jika Anda pergi ke Vietnam Utara, Anda akan melihat banyak pohon yang tumbang setelah topan Yagi, topan terdahsyat selama beberapa dekade," tuturnya.

Dia melanjutkan dengan mencatat bahwa fenomena serupa terjadi di Indonesia, di mana banjir menjadi ancaman yang berulang. Pedersen menekankan bahwa perubahan iklim adalah masalah yang memengaruhi tidak hanya masyarakat tetapi juga menjadi perhatian utama pemerintah dan pelanggan mereka. "Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang masyarakat kita. Ini menjadi agenda utama bagi pemerintah dan tentu saja juga bagi para pelanggan saya," jelasnya.

Komitmen Maersk terhadap dekarbonisasi, menurut Pedersen, adalah tanggung jawab moral dan strategis yang diambil dengan sangat serius. Perusahaan ini tidak hanya berupaya untuk berinovasi, tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.

Maersk, yang merupakan salah satu perusahaan pengiriman terbesar di dunia, menargetkan dekarbonisasi lebih cepat dibandingkan banyak negara, termasuk Indonesia yang menargetkan

netral karbon pada 2060. "Kalau saya paling lambat 2050. Di Maersk, kami menargetkan tahun 2040. Dan ini tidak hanya untuk pengiriman. Ini untuk seluruh rantai pasokan. Ini untuk pelabuhan, ini untuk gudang, ini untuk truk, ini untuk semuanya." tegas Pedersen.

Pedersen juga mengakui tantangan besar dalam mencapai target ini, terutama terkait ketersediaan bahan bakar hijau. "Kapal-kapal yang kami beli hari ini akan tetap beroperasi hingga 2040. Karena itu, kapal-kapal ini harus menjadi bagian dari solusi," tambahnya. Maersk baru-baru ini menerima kapal kontainer pertama yang bertenaga metanol hijau, meskipun Pedersen mengakui bahwa tantangan terkait skala produksi dan harga bahan bakar masih ada.

Indonesia, menurut Pedersen, memiliki potensi besar untuk menjadi produsen bahan bakar hijau seperti metanol, mengingat sumber daya biomassa yang melimpah. Namun, ia menekankan bahwa selain metanol, bahan bakar lain seperti amonia hijau juga sedang dieksplorasi sebagai opsi masa depan.

"Teknologi sudah tersedia, tetapi tantangan utama adalah ketersediaan bahan bakar hijau dalam skala besar," pungkasnya, sembari mengajak lebih banyak kolaborasi dalam mencari solusi energi hijau di sektor maritim.

India dan Indo-Pasifik, Sebuah Perspektif Strategis

Pada sesi pertama hari kedua pelaksanaan Jakarta Geopolitical Forum VIII 2024, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai visi negaranya terhadap kawasan Indo-Pasifik. Peran strategis India dan Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik menjadi sorotan utama.

“Tidak mungkin ada konsep Indo-Pasifik tanpa India dan Indonesia. Jadi menurut saya, hal ini harus dipahami ketika kita membahas Indo-Pasifik,” kata Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty pada Jakarta Geopolitical Forum VIII di Ritz Carlton, Jakarta.

Kawasan Indo-Pasifik dengan segala kompleksitas dan dinamika yang ada, telah menjadi pusat perhatian dunia. Persaingan antarkekuatan besar, perubahan iklim, dan ancaman non-tradisional, seperti cyberattacks dan disinformasi semakin mengintensifkan persaingan dan kerja sama di kawasan ini.

Kawasan Indo-Pasifik yang mencakup perairan strategis dari Samudera Hindia hingga Pasifik dianggap sebagai salah satu kunci utama dalam geopolitik global dan tidak hanya akan menentukan masa depan kawasan tersebut, tetapi juga dapat membentuk kembali tatanan internasional secara keseluruhan.

“Isu ini merupakan inti dari geopolitik kontemporer karena Indo-Pasifik siap untuk tidak hanya menentukan kembali nasib dan kemakmuran dari negara-negara di kawasan ini, tetapi juga memiliki potensi untuk membentuk kembali tatanan internasional secara keseluruhan,” lanjutnya.

Duta Besar India untuk Indonesia menggarisbawahi perubahan geopolitik global kini berlangsung dengan sangat cepat dan tajam, terutama di kawasan Indo-Pasifik. “Telah diakui secara luas bahwa tatanan global kontemporer sedang mengalami perubahan yang cepat dan tajam,” ungkapnya.

Kawasan ini menjadi tempat kompetisi dan kontestasi antara negara-negara besar,

tetapi juga menjadi wadah kolaborasi dan kerja sama antara negara-negara besar, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi dan kerja sama antarnegara. Tantangan besar bagi negara-negara di kawasan ini adalah dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan yang menjadi salah satu area dengan tingkat ketegangan geopolitik tertinggi.

“Tindakan di Laut Cina Selatan telah cukup menunjukkan besarnya risiko. Persaingan negara-negara besar di Indo-Pasifik telah memberikan dampak pada dimensi lain yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa dekade mendatang,” paparnya.



Duta Besar India untuk Indonesia juga menyoroti tantangan global yang lebih luas, termasuk ancaman konflik yang berkepanjangan di Eropa dan Asia Barat. “Konflik ini telah memperkuat keberadaan perang konvensional di mana-mana, mematahkan mitos tentang konflik yang singkat dan cepat serta mencontohkan dampak global dari peristiwa semacam itu di dunia yang semakin saling terhubung dan saling bergantung,” jelasnya.

Namun, di sisi selatan dan timur India, Samudera Hindia, kawasan ini masih relatif damai berkat upaya bersama dan kolaborasi dengan negara-negara sahabat, seperti Indonesia. “Samudera dan lautan seharusnya menjadi jalur perdamaian dan kemakmuran bagi semua. Bagi kami, Samudera Hindia secara historis memiliki posisi sentral dengan mendukung perdagangan dan mempertahankan mata pencaharian, menawarkan konektivitas dan sumber daya,” tegasnya.

Pentingnya keamanan maritim di Samudera Hindia, khususnya untuk memastikan perairan tetap aman, terlindungi, dan terbuka bagi semua pihak.

Selain tantangan keamanan, dampak dari krisis global seperti pandemi COVID-19 dan krisis energi yang menyoroti pentingnya ketahanan rantai pasokan dan distribusi produksi yang merata di berbagai kawasan.

Menghadapi tantangan ini, India telah meluncurkan inisiatif yang disebut dengan SAGAR atau Security and Growth for All in The Region. Inisiatif ini difokuskan pada kerja sama maritim untuk menciptakan lautan yang aman, terlindungi, dan stabil di kawasan Indo-Pasifik.

“Konsep SAGAR berfokus pada langkah-langkah kerja sama untuk pemanfaatan lautan yang berkelanjutan dan menciptakan sebuah kerangka kerja untuk domain maritim yang aman, terlindungi dan stabil di kawasan ini,” ungkapnya.

India juga menginisiasi Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) yang mencerminkan visi bersama negara-negara di kawasan untuk menjaga dan melestarikan wilayah laut Indo-Pasifik. IPOI berfokus pada tujuh pilar kerja sama, termasuk keamanan maritim, ekologi, dan penanganan bencana.

India juga terlibat dalam kerja sama regional lainnya, seperti BIMSTEC dan QUAD yang memperkuat keamanan, stabilitas, dan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik.

Di akhir, Duta Besar India untuk Indonesia menekankan pentingnya UNCLOS (United Nations Convention on The Law of The Sea) sebagai dasar bagi tatanan maritim yang berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik. India, sangat berkomitmen terhadap UNCLOS dan tatanan berbasis aturan yang mendukung kebebasan navigasi dan perdagangan di laut.

“India berkomitmen dengan UNCLOS sebagaimana terlihat dari pengakuannya atas keputusan ITLOS mengenai batas-batas maritim dengan Bangladesh dan Myanmar. Kami mendukung tatanan berbasis aturan dan bersedia untuk bekerja sama dengan para mitra untuk menciptakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” tutupnya.

Rusia Luncurkan Doktrin Maritim Baru untuk Menghadapi Dinamika Geopolitik Global

Dalam sesi kesatu hari kedua Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 "Addressing Geo-Maritime Resilience Challenges in the Indo-Pacific" yang berlangsung pada (26/9) bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta., Wakil Komandan Angkatan Laut Rusia, Laksamana Madya Vladimir Vorobev menyampaikan doktrin maritim baru Rusia yang direformasi secara mendalam untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan geopolitik dan strategi militer dunia.

Pengembangan doktrin baru ini sangat penting, ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa struktur dan konten doktrin kami selaras dengan dinamika global yang berubah cepat

Laksamana Vorobev

Doktrin maritim baru Rusia mulai diimplementasikan pada Juli 2022, menggantikan versi sebelumnya yang dibuat pada tahun 2015. Dilandasi oleh keputusan Presiden Vladimir Putin dan peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin ini mendefinisikan kebijakan maritim nasional Rusia dan arah aktivitas maritimnya. Dari pengembangan transportasi maritim hingga penelitian ilmiah maritim, serta operasi angkatan laut yang strategis, doktrin tersebut merinci berbagai aspek penting dari kekuatan maritim Rusia.

Laksamana Vorobev menekankan bahwa kegiatan angkatan laut memiliki tempat khusus dalam doktrin tersebut. "Kegiatan

angkatan laut adalah aktivitas negara yang bertujuan untuk mencegah agresi terhadap Federasi Rusia dan melindungi kepentingan nasional kita di lautan dunia," jelasnya, menambahkan bahwa semua aktivitas ini dilaksanakan sesuai dengan dasar-dasar kebijakan negara yang disetujui oleh Presiden Rusia.

Pada bagian lain dari dokumen, doktrin tersebut juga menyoroti pentingnya kerjasama regional, terutama di kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Rusia berupaya mengembangkan kemitraan strategis dan kerjasama militer dengan negara-negara di kawasan ini, untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian regional. "Kami bertujuan untuk menjaga kehadiran angkatan laut Rusia secara konstan di kawasan ini, berpartisipasi dalam memastikan keamanan rute transportasi maritim, termasuk memerangi pembajakan," ujar Laksamana Vorobev.

Selain aspek militer dan strategis, doktrin juga menyentuh isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Rusia mengakui pentingnya melindungi dan melestarikan ekosistem laut dan telah menetapkan regulasi ketat terkait emisi dan pengelolaan sumber daya laut. "Kami bertekad untuk mengurangi jejak karbon sektor maritim kami dan meningkatkan performa lingkungan," kata Laksamana Vorobev.

Pembahasan tentang pembangunan kapal juga tidak luput dari perhatian. Doktrin menekankan pembangunan industri kapal yang kompetitif, dilengkapi dengan teknologi

canggih dan sumber daya manusia yang terampil, sebagai kunci untuk memastikan keamanan nasional dan pengembangan sosial yang berkelanjutan.

Baik dalam implementasi dan implikasinya, doktrin maritim ini tidak hanya mencerminkan strategi pertahanan, tetapi juga ambisi Rusia untuk memainkan peran penting dalam tata kelola maritim global dan mendukung perdamaian dan stabilitas internasional. Ini adalah sebuah dokumen yang mencakup dari teknologi canggih hingga diplomasi laut, mencerminkan pendekatan Rusia yang komprehensif dan multi dimensi dalam menghadapi tantangan maritim di abad ke-21.



INDONESIA

GLOBAL MARITIME FORUM VIII/2024

AND ITS PERSPECTIVE ON GOOD ORDER AT SEA

JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM VIII/2024



Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma Tegaskan Indonesia Berkomitmen terhadap Prinsip Poros Maritim Dunia

Indo-Pasifik terus menjadi kawasan geopolitik dan geoekonomi penting yang berkontribusi pada sebagian besar aktivitas perdagangan dan ekonomi dunia. Namun, dengan keunggulan ini, muncul serangkaian tantangan yang kompleks. Kawasan Indo-Pasifik menghadapi berbagai permasalahan maritim, sengketa wilayah, dan peningkatan ancaman seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan.

Pembicara pada sesi pertama hari kedua pelaksanaan Jakarta Geopolitical Forum VIII 2024 Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma menyebutkan di awal paparannya bahwa rivalitas antar negara-negara besar membuat Indo-Pasifik menjadi medan pertempuran yang bertujuan untuk mendominasi lokasi strategis serta memperburuk permasalahan yang sudah ada, mempersulit upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di laut dan mengancam basis aturan Tatanan Maritim Internasional. Indonesia yang terletak di jantung Indo-Pasifik, lanjut Erwin S. Aldedharma, mempunyai peran penting dalam mendorong keamanan dan stabilitas di Kawasan indo pasifik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia yang merupakan pusat maritim alami menguasai jalur laut strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Kebijakan Poros Maritim Dunia Indonesia diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Poros Maritim Dunia menekankan identitas dan peran Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki posisi strategis di jantung kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan Poros Maritim Dunia Indonesia berfokus pada lima pilar utama. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam konektivitas maritim. Kedua, mengelola sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan, menyeimbangkan pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan. Ketiga, mengembangkan infrastruktur dan

konektivitas maritim untuk memastikan akses yang mudah untuk ribuan pulau di Indonesia. yang keempat adalah memperkuat pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan melindungi perbatasan maritim Indonesia. Yang kelima adalah mendorong diplomasi maritim yang berfokus pada penyelesaian sengketa maritim secara damai dan memajukan stabilitas Kawasan indo pasifik.

Melalui Poros Maritim Dunia, Indonesia berupaya membina kerja sama regional dalam menanggulangi ancaman keamanan maritim seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan sengketa wilayah. Kawasan Indo-Pasifik menghadapi ancaman yang muncul dari persaingan geopolitik, aktor non-negara, dan perubahan iklim. "Fokus kami tidak hanya pada kekuatan angkatan laut tetapi juga pada inisiatif Ekonomi Biru yang secara berkelanjutan memanfaatkan Sumber Daya Kelautan untuk pertumbuhan ekonomi," jelas Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma.

Perspektif Indonesia mengenai ketertiban di Laut berakar pada keyakinan bahwa wilayah maritim harus diatur berdasarkan Hukum dan Ketertiban. "Komitmen Indonesia terhadap ketertiban di Laut tercermin dalam tiga bidang utama." tutur Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma.

Pertama, menegakkan hukum internasional. Indonesia sangat mendukung supremasi Hukum di Laut khususnya konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 atau UNCLOS. Kedua, meningkatkan tata kelola Maritim. Indonesia meningkatkan tata kelola Maritimnya melalui: pertama, kemampuan penegakan hukum yang lebih kuat. kedua, integrasi pemangku kepentingan Maritim. Ketiga, mempromosikan diplomasi Maritim dan langkah-langkah membangun kepercayaan. Indonesia memandang diplomasi sebagai alat yang ampuh untuk membina ketertiban di laut.

"Melalui forum-forum seperti ASEAN Defense Ministers Meeting or ADMM, the

East Asia Summit atau EAS and the Indian Ocean rim of Association atau Iora, kita terlibat dalam langkah-langkah membangun kepercayaan untuk mengurangi ketegangan dan mencegah konflik di Kawasan Indo-Pasifik," jelas Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma.

Bidang maritim saat ini lebih kompleks dan dinamis dengan permasalahan keamanan tradisional yang kini diperparah oleh ancaman-ancaman yang muncul seperti serangan siber, peperangan hibrida, dan tantangan-tantangan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Namun tantangan-tantangan ini juga menghadirkan peluang untuk meningkatkan Kerjasama Regional.

Untuk menghadapi tantangan di masa depan, Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma mengusulkan beberapa rekomendasi. Pertama, memperkuat Kerangka Kerja Regional seperti ASEAN dan IORA untuk meningkatkan keamanan dan keberlanjutan maritim. Kedua, meningkatkan mekanisme pertukaran informasi dan membangun inisiatif peningkatan kapasitas untuk melawan ancaman transnasional di laut. Ketiga, mendorong kerja sama dan patroli gabungan tingkat multilateral untuk melindungi jalur komunikasi laut bersama. Terakhir, mendorong inisiatif ekonomi biru berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Di akhir paparannya, Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma menyatakan bahwa Kesimpulannya, Indonesia berkomitmen penuh terhadap prinsip Poros Maritim Dunia. "Adanya keterkaitan keamanan maritim berarti tidak ada negara yang dapat mengatasi ancaman ini sendirian. tantangan yang kita hadapi saat ini memang rumit namun bukan berarti tidak dapat diatasi. melalui kerja sama, diplomasi, dan visi bersama untuk masa depan lautan, kita dapat memastikan kawasan Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera untuk generasi mendatang," pungkasnya.

Erik Van Der Veen Bongkar Jaringan Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, dari Perairan ke Pengadilan

Kawasan Asia Tenggara, dengan perairan yang membentang luas dan aktivitas perdagangan yang padat, menjadi pusat tantangan baru dalam memerangi kejahatan terorganisir. Peran strategis wilayah ini sebagai jalur penting bagi perdagangan global juga menjadi sasaran empuk bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan celah di zona maritim. Dalam pertemuan Jakarta Geopolitical Forum VIII di Jakarta, Erik Van Der Veen, Head of Office and Liaison to ASEAN UNODC di Indonesia, menyoroti pentingnya kerja sama internasional untuk menghadapi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks.

Menurutnya, perairan Asia Tenggara menghadapi ancaman yang terus berkembang dan mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan. Ia menegaskan bahwa kerja sama di antara negara-negara kawasan sangat penting untuk memastikan respons yang cepat dan

efektif terhadap kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara.

“Kejahatan maritim di Asia Tenggara menimbulkan tantangan yang sangat kompleks bagi kita sebagai komunitas. Kecanggihan dalam pendekatan dan metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal akan terus berkembang,” kata Erik Van Der Veen saat memberikan presentasi pada kegiatan Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 di Jakarta (26/09).

Salah satu kejahatan yang terus meningkat di perairan Asia Tenggara adalah perdagangan narkoba. Erik Van Der Veen menjelaskan bagaimana rute seperti Selat Malaka dan Laut Andaman menjadi rute utama perdagangan narkoba ini.

Selain itu, metode penyelundupan yang semakin canggih, seperti penggunaan kontainer tersembunyi di bawah kapal atau memanfaatkan penyelam scuba untuk menyembunyikan barang di bagian luar kapal, memperlihatkan betapa dinamisnya ancaman ini.

Beliau juga menekankan bahwa peningkatan keterampilan penegak hukum dalam hal investigasi dan inspeksi menjadi kunci untuk menekan peredaran narkoba melalui jalur-jalur laut yang begitu luas. Oleh karena itu, UNODC rutin menyelenggarakan pelatihan di berbagai pusat pelatihan regional, salah satunya di Batam, bekerja sama dengan Bakamla (Badan Keamanan Laut). Pelatihan ini mencakup keterampilan inspeksi, penggeledahan serta penyitaan narkoba dan barang ilegal lainnya di kapal-kapal yang melintasi perairan strategis.

Selain narkoba, kejahatan lain yang mengkhawatirkan adalah perdagangan barang selundupan dan penyelundupan manusia. Perdagangan limbah ilegal juga menjadi perhatian serius di kawasan ini. Kelompok kriminal

sering menyelundupkan limbah berbahaya, seperti limbah elektronik dan kimia, dengan mencampurkannya dalam pengiriman limbah legal. Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia di kawasan Asia Tenggara.

Penyelundupan manusia yang seringkali melibatkan orang-orang dalam kondisi rentan, menjadi salah satu fokus UNODC dalam kolaborasinya dengan negara-negara anggota di kawasan ini. Van Der Veen menjelaskan bahwa sebagian besar korban penyelundupan manusia tidak memiliki pilihan lain selain membayar para penyelundup untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

Erik Van Der Veen menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk melawan kejahatan maritim dan lintas batas ini adalah melalui peningkatan kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara. “Salah satu cara utama yang dapat kita lakukan untuk memerangi dan mengatasi hal tersebut adalah dengan memfasilitasi kerja sama di antara berbagai pemerintah,” tambahnya.

Dalam hal ini, UNODC telah mendukung inisiatif-inisiatif, seperti Forum Penjaga Pantai ASEAN dan Dialog Penegakan Hukum Maritim yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antarnegara di kawasan dalam menangani berbagai tren kejahatan terorganisir.

Salah satu rekomendasi utama saya bisa yang diusulkan adalah pentingnya berbagi informasi secara real-time antara negara-negara anggota. “Berbagi informasi secara real-time, mekanisme sistem alat apapun yang dapat kami siapkan dengan rekan-rekan kami di negara lain tentu akan sangat membantu,” tegasnya.

Selain itu, operasi gabungan antara negara-negara di kawasan ini, terutama di wilayah perairan yang menjadi titik rawan perdagangan ilegal, menjadi prioritas yang diharapkan akan memperkuat upaya kolektif melawan kejahatan lintas batas.

Kejahatan terorganisir di perairan Asia Tenggara tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan semakin canggih dari waktu ke waktu. Namun, dengan kolaborasi yang erat dan berbasis pada instrumen hukum internasional, seperti yang ditekankan oleh UNODC dan Erik Van Der Veen, ada harapan untuk melawan dan meredam ancaman ini.

“Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi fenomena ini, terutama dengan bekerja sama dan berbagi informasi,” tutupnya.



ICRC Soroti Dampak Kemanusiaan Perang di Laut dan Teknologi Perang Baru



Regional Humanitarian Affairs Adviser of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Masayoshi Mita hadir sebagai salah satu narasumber dalam sesi Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta (25/9). Pada kesempatan tersebut, Masayoshi menyampaikan bahwa ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang netral dan independen. ICRC hadir untuk melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata, situasi kekerasan lain, dan memberikan bantuan serta mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dengan mempromosikan International Humanitarian Law (IHL) dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Masayoshi Mita menyampaikan potensi dampak kemanusiaan dari konflik di laut, yakni meningkatnya jumlah konflik bersenjata di seluruh dunia, risiko terhadap warga sipil yang tinggal di lingkungan maritim, risiko terhadap infrastruktur penting warga sipil di laut, dampak lingkungan, dan dampak terhadap pasokan makanan dan kebutuhan pokok.

Selain itu, Masayoshi Mita ini menyoroti tantangan dari teknologi perang modern seperti operasi siber yang dapat mengganggu layanan penting yang bergantung pada jaringan komputer, termasuk rumah sakit dan pembangkit listrik. ICRC menyerukan pentingnya kontrol manusia dalam penggunaan sistem

senjata otonom untuk menghindari risiko yang tidak dapat diprediksi dari kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. "Sekarang ketidakpastian dari AI bisa yang bekerja diluar kendali kita, jadi harus ada level minimal tertentu dari kendali manusia dari penggunaan teknologi memitigasi hal-hal yang bisa dicegah."

ICRC menekankan bahwa hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949, harus tetap menjadi panduan utama untuk melindungi warga sipil selama konflik bersenjata. Konvensi tersebut, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-75 pada tahun 2024, menyediakan kerangka hukum yang mencegah atau mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik, termasuk di laut.

ICRC juga berupaya memastikan bahwa semua negara membagikan pandangan mereka terkait penerapan hukum ini dalam konteks teknologi perang baru. Ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara serta memastikan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter yang berlaku.

Menghormati dan memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional tidak hanya penting untuk perlindungan warga sipil, tetapi juga merupakan jalur esensial menuju perdamaian. ICRC mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun budaya universal yang menjunjung tinggi IHL, baik melalui penerapan di tingkat domestik

maupun kerja sama internasional. "Setiap negara harus memastikan validitas IHL dan kami bisa mendukung klarifikasi dari validasi tersebut, karena tujuannya untuk melindungi warga sipil, poin utamanya bagaimana negara mengaplikasikan hukum kemanusiaan," ungkap Masayoshi Mita.

Masayoshi Mita juga mengingatkan bahwa ICRC siap bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk memastikan persiapan kemanusiaan yang memadai dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di abad ke-21.

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan perkembangan pesat teknologi perang, ICRC menyerukan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional sebagai kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman di laut.

Diakhir paparannya, Masayoshi menyimpulkan beberapa hal utama, yakni IHL tetap relevan sebagai pilar utama untuk perlindungan warga sipil di masa konflik bersenjata, termasuk di laut, lalu menghormati dan memastikan penghormatan terhadap IHL sebagai jalur penting untuk membangun kepercayaan dan perdamaian untuk kesiapsiagaan kemanusiaan, serta ICRC tetap siap bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait.



JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM VIII/2024

Laksamana (Purn.) Sudarshan Shrikhande Paparkan **Tantangan Kerjasama Keamanan Maritim di Masa Depan**

Laksamana (Purn.) Sudarshan Shrikhande Fellowship of the Australian National Center for Ocean Resources and Security (ANCORS) dalam paparannya pada sesi kedua hari kedua pelaksanaan Jakarta Geopolitical Forum VIII 2024 mengatakan bahwa kerja sama yang nyata lebih terlihat dari cara pemerintah dan armada laut berkumpul untuk memastikan keamanan navigasi bagi semua pengguna demi keselamatan di laut dan juga dalam bidang pencarian dan penyelamatan bersama.

Tantangan dalam hal sumber daya, kesulitan fisik dalam bekerja sama karena adanya keterbatasan dalam komunikasi dan pertukaran informasi, bahkan karena adanya gesekan akan selalu menjadi bagian dari kenyataan geopolitik.

Di bagian awal Asean Maritime Outlook 2023 disebutkan dan saya kutip “Sengketa Maritim Terkait Perairan Maritim Asia Tenggara” sebagai tantangan pertama dari beberapa tantangan yang ada. Salah satu contoh konflik yang digarisbawahi

oleh wakil menteri luar negeri Indonesia adalah konflik perbatasan antara India dan Tiongkok serta masalah Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Indonesia.

Sudarshan Shrikhande menyebutkan bahwa cara ASEAN memimpin dapat ditiru oleh kelompok di kawasan lain. Adanya pendirian pusat fusi informasi adalah salah satu cara memanfaatkan data terbatas mengenai pergerakan kapal putih (White Ship Movements) dan meningkatkan pembagian informasi



keamanan pelabuhan. Hal ini berkembang hampir bersamaan menjadi inisiatif serupa di beberapa wilayah lain di kawasan Samudra Hindia termasuk The quadrilateral security dialogue yang disebut dengan The Quad yang berfokus pada perencanaan penyampaian berbagai barang publik.

Deklarasi Wilmington yang baru-baru ini dikeluarkan pada tanggal 21 September 2023 setelah KTT para pemimpin the quad di Amerika Serikat menilai beberapa sudut pandang tujuan multidisiplin, multi-organisasi, dan multi-dimensi dari the quad untuk mengatasi tantangan masa depan kawasan Indo-Pasifik. Pertama, lanjut Sudarshan Shrikhande, deklarasi ini menegaskan bahwa The Quad akan terus bersikap transparan terkait hal yang sedang dikerjakan oleh The Quad dan bersikap hormat terhadap ASEAN, The Pacific Islands Forum, Indian Ocean Rim Association (IORA) sehingga memungkinkan adanya pertukaran informasi dan upaya yang lebih besar terkait keamanan maritim.

Kedua, The Quad berharap untuk bekerja

sama dengan ASEAN, PIF, IORA dan mitra yang lain dengan menggarisbawahi komitmen terhadap tatanan internasional berbasis aturan yang ditegaskan kembali oleh The Quad dan forum-forum seperti ASEAN pada Deklarasi ASEAN pada 16 Oktober 2023 di PBB. Ketiga, deklarasi ini berharap ASEAN, IORA, PIF, dan The Quad menyadari tantangan dalam mempertahankan kebebasan sembari terus berupaya menemukan solusi di kawasan Indo-Pasifik.

Mengenai kelancaran dan keamanan arus perdagangan, Sudarshan Shrikhande mengatakan bahwa peningkatan efisiensi dan keamanan Pelabuhan di seluruh kawasan Indo-Pasifik merupakan tantangan lain yang harus dikoordinasikan dengan baik oleh kelompok-kelompok tersebut. "ASEAN mungkin sudah lebih dulu memulai hal ini dan menyediakan kerangka kerja tidak hanya untuk koordinasi namun juga pembelajaran dan emulasi. ASEAN Outlook Maritime tahun 2023 menyebutkan tentang 523 pelabuhan laut internasional di negara-negara anggotanya dan kemajuan yang dicapai dalam memajukan rencana aksi Regional tahun 2017 tentang keamanan Pelabuhan yang telah mencakup pelatihan." tuturnya.

Quad Summit telah mengumumkan pelabuhan The Quad akan memanfaatkan keahlian The Quad untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan yang berkelanjutan dan berketahanan di seluruh Indo-Pasifik melalui kerja sama dengan Mitra regional. Untuk memulainya, Sudarshan Shrikhande menuturkan bahwa India akan menjadi tuan rumah konferensi pelabuhan regional dan transportasi di Mumbai pada tahun 2025 dan merupakan ide yang berguna jika para pejabat ASEAN berpartisipasi.

Bidang lain yang menjadi perhatian The Quad adalah mengatasi dan

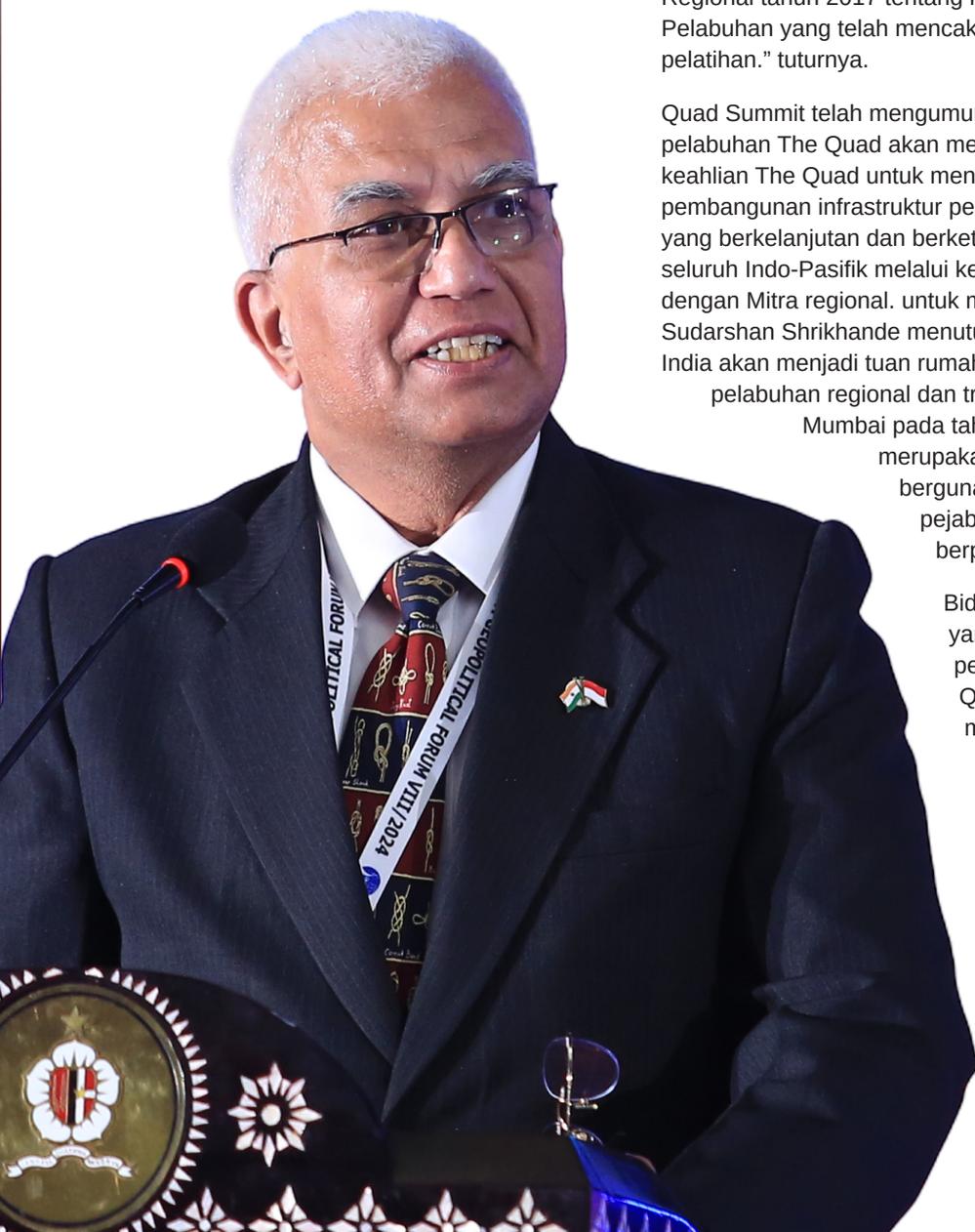
memperlambat dampak perubahan iklim serta upaya menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Pemanasan global, jelas Sudarshan Shrikhande, akan sangat berdampak di kawasan Indo-Pasifik karena sebagian besar penduduknya tinggal wilayah pesisir. ASEAN, PIF dan IORA telah mengadakan pertemuan, laporan dan rencana aksi selama beberapa tahun ke depan yang sedang dilaksanakan secara regional. The Quad terus bekerja sama dengan Indo-Pasifik termasuk melalui paket adaptasi perubahan iklim dan mitigasi The Quad yang disebut dengan "Q-CHAMP" untuk meningkatkan kualitas iklim dan energi hijau.

Semua kerja sama tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Hal ini juga akan menjadi tantangan besar karena teknologi baru dapat mengurangi peluang kerja bagi kaum muda di wilayah Indo-Pasifik meskipun teknologi tersebut berkontribusi pada tingkat kesejahteraan.

Sudarshan Shrikhande lebih lanjut mengatakan bahwa tantangan besar lainnya yang memerlukan lebih banyak kerja sama adalah kerja sama yang menghubungkan beberapa forum ini untuk mencegah peredaran narkoba, terorisme dan mencegah kejahatan di sepanjang jalur laut.

Di akhir paparannya, Sudarshan Shrikhande menyimpulkan bahwa tantangan yang ada juga dapat meningkatkan peluang kerja sama antar organisasi dan forum terkait seperti

IORA, ASEAN, PIF dan The Quad serta kerja sama multilateral yang sudah ada maupun yang akan datang sehingga hal hal berkaitan dengan maritim dapat memberikan manfaat bagi pembangunan manusia, kelangsungan hidup manusia, dan ketahanan umat manusia.



JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM VIII/2024

Tiga Tantangan

Pengelolaan Potensi Laut China Selatan



Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) Pahala Nugraha Mansury, S.E., M.B.A. menyebutkan bahwa ada beberapa tantangan dalam pengelolaan potensi Laut China Selatan.

“Pengelolaan yang tepat atas Laut China Selatan dapat membawa kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara di sekitarnya. Namun, di balik potensi tersebut, ada juga beberapa tantangan,” kata Wamenlu RI saat memberikan pidato kunci pada kegiatan Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta (25/9).

Tantangan pertama yang dihadapi adalah klaim tumpang tindih antarnegara di Laut China Selatan. “Saat ini, kita semakin melihat narasi konflik antarnegara terkait Laut China Selatan. China, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Malaysia semuanya mengklaim wilayah laut ini. Hal ini telah menyebabkan banyak insiden di Laut China Selatan, termasuk bentrokan terbaru pada Agustus tahun ini,” imbuh Wamenlu Pahala.

Kedua, kejahatan transnasional yang terus meningkat di Laut China Selatan telah menjadi perhatian internasional. Kejahatan terkait perikanan terus meningkat dan kegiatan kriminal lain, seperti perdagangan manusia, eksploitasi, penyelundupan narkoba dan manusia, serta imigrasi gelap juga turut menjadi masalah besar. Hal ini harus ditangani dan membutuhkan upaya kolektif dari negara-negara di kawasan.

“Ketiga, degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Jumlah sumber daya yang melimpah telah menjadi anugerah sekaligus kutukan di Laut China Selatan, di mana eksploitasi yang berlebihan merajalela. Sebagai contoh, lebih dari lima puluh persen kapal penangkap ikan di dunia beroperasi di Laut China Selatan, yang menyebabkan stok ikan menurun drastis,” kata Wamenlu Pahala.

Selain itu, eksplorasi serta pengeboran minyak dan gas juga telah menyebabkan kerusakan pada ikan maupun mamalia laut. Dampak perubahan iklim ini juga termasuk menghangatnya suhu air dan pola cuaca ekstrim yang telah memengaruhi karang serta spesies lain di Laut China Selatan.

Meski demikian, Wamenlu Pahala melihat bahwa ada beberapa hal yang sangat penting untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, khususnya di Laut China Selatan.

Pertama, arsitektur inklusif regional. Konflik di Laut China Selatan kemungkinan besar tidak akan menguntungkan siapa pun dalam jangka panjang. Sebaliknya, hal ini akan memastikan kerugian ekonomi bagi negara-negara di kawasan, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di negara-negara sekitarnya di jalur pelayaran.

Di kawasan Pasifik, Wamenlu melihat banyak wilayah yang telah lama menjadi kekuatan positif dan menekankan pada komunikasi, konsultasi, serta rasa saling percaya. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi potensi konflik regional, antara lain, melalui mekanisme pembangunan kepercayaan, seperti ASEAN Defense Minister Meeting-Plus, ASEAN Plus Three, dan ASEAN Regional Forum.

Kedua, penghormatan terhadap hukum internasional. Hal ini telah menjadi prinsip dasar dalam mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

Konvensi PBB tentang hukum laut sebagai bagian dari hukum internasional tidak diragukan lagi telah menjadi sumber utama dan kerangka kerja yang komprehensif tentang hukum laut. Dalam hal ini, Indonesia selalu menekankan pentingnya hukum internasional dalam menyelesaikan setiap sengketa di China Selatan terkait tumpang tindih klaim.

“Indonesia bukanlah negara pengklaim fitur-fitur maritim di Laut China Selatan. Kami juga secara konsisten menyatakan bahwa setiap klaim harus dibuat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,” kata Wamenlu Pahala.

Ketiga, memerangi kejahatan maritim transnasional. Mekanisme kerja sama di antara negara-negara di kawasan ini telah tersedia, termasuk dialog kebijakan dan berbagi informasi. Di masa depan, ada kebutuhan untuk secara bertahap melembagakan dan memobilisasi kerja sama yang lebih besar dalam memerangi kejahatan di Laut China Selatan. Hal ini dilakukan dengan tetap menghormati hukum internasional dan kedaulatan

nasional negara-negara.

Menurut Wamenlu Pahala, hal yang berikutnya adalah mengatasi perubahan iklim. “Jika ada satu hal yang dapat menyatukan negara dan umat manusia, maka hal itu adalah mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi ancaman eksistensial dari waktu ke waktu,” imbuhnya.

Dalam kasus Laut China Selatan, perubahan iklim cenderung mengintensifkan persaingan sumber daya di sekitarnya, sehingga menimbulkan lebih banyak biaya untuk konflik. Namun di sisi lain juga dapat menjadi faktor untuk menyatukan semua pihak dan meningkatkan kerja sama yang konkret.

Terakhir adalah pengembangan ekonomi biru. Mengingat potensi yang ada di Laut China Selatan, maka sangat masuk akal jika ekonomi biru menjadi bidang kerja sama yang harus dikembangkan di antara negara-negara di kawasan.

“ASEAN telah menegaskan kembali komitmennya terhadap kerja sama regional di bidang ekonomi biru dan menciptakan kerangka kerja ekonomi biru dengan tiga prinsip, nilai tambah, inklusivitas, dan keberlanjutan,” kata Wamenlu Pahala.

Melalui beberapa hal ini, diharapkan Laut China Selatan yang menghubungkan orang-orang, bangsa-bangsa, dan negara-negara dapat mengikat mereka bersama dalam semangat mengejar perdamaian dan kemakmuran bersama, serta tidak menjadi wilayah kontestasi yang menonjolkan perbedaan posisi geopolitik, memisahkan orang dan negara lebih jauh atau bahkan menjadi medan perang.

JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM VIII/2024

Strategi Pertahanan Indonesia dalam Perlindungan Kawasan Maritim

Foto. tnial.mil.id



Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Letnan Jenderal TNI (Purn) M. Harindra menyebutkan bahwa strategi pertahanan Indonesia menekankan pada modernisasi angkatan laut, peningkatan patroli, dan partisipasi dalam latihan militer multilateral.

“Upaya-upaya ini sangat penting, tidak hanya untuk menegaskan pengaruh kita, tetapi juga memastikan kebebasan dan keamanan jalur laut perdagangan internasional di perairan yang sangat strategis ini,” kata Wamenhan RI saat memberikan pidato kunci sesi tiga kegiatan Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta (26/9).

Kawasan Indo-Pasifik, yang mencakup jalur laut strategis, telah menjadi subjek persaingan geopolitik internasional, terutama antara negara-negara superpower. Pentingnya kawasan ini tidak dapat diragukan lagi, karena selain menjadi jalur utama perdagangan dunia, juga menjadi medan perebutan antara negara-negara besar.

“Persaingan ini tidak hanya tampak dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan militer dengan negara-negara, seperti Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis maupun negara-negara kuat lainnya,” tambah Wamenhan Harindra.

Prinsip non-blok dan keinginan untuk

mempertahankan kedaulatan NKRI adalah dasar dari strategi geopolitik maritim dan kebijakan pertahanan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga terus berkomitmen terhadap kebijakan bebas aktif di luar negeri.

Meskipun terlibat aktif dalam kerja sama pertahanan dengan mitra utama seperti Australia dan Amerika Serikat, Indonesia masih berhati-hati agar tidak bergabung dalam aliansi militer secara formal.

“Sikap ini memungkinkan untuk menavigasi lingkungan geopolitik kompleks di Indonesia maupun di kawasan Indo-Pasifik sambil menjaga otonomi kita,” imbuh Wamenhan Harindra.

Dalam pidatonya, Wamenhan Harindra juga menyampaikan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia adalah memprioritaskan dan memobilisasi sumber daya militer maupun non militer.

Pendekatan komprehensif ini menekankan pada solusi diplomatik dan membangun sistem pertahanan yang tangguh dan mampu menghalau ancaman.

“Menyelesaikan masalah di Laut China Selatan secara damai sangatlah penting untuk menjaga stabilitas regional dan mendukung perkembangan ekonomi di Asia Tenggara,” kata Wamenhan Harindra.

Oleh karena itu, fokus diplomatik Indonesia, baik dalam ASEAN maupun secara global, menekankan penyelesaian damai sambil mempertahankan kesiapan

pertahanan. Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan kawasan maritim yang damai dengan menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong kerja sama maritim. Sehingga kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan, daripada pusat konflik.

“Indonesia bersama ASEAN memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan maritim dan ekonomi biru,” kata Wamenhan Harindra.

Namun, jika diplomasi tidak cukup, maka komitmen kita untuk meningkatkan kemampuan pertahanan tetap tegas. Strategi ganda ini, baik diplomatik maupun militer, mencerminkan kesadaran kita bahwa keamanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada pemahaman diplomatik dan penguatan persatuan nasional.

Wamenhan Harindra menilai kegiatan Jakarta Geopolitical Forum ini dapat menjadi kesempatan untuk merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan kemampuan pertahanan nasional Indonesia dan mendukung stabilitas kawasan.

“Saya yakin bahwa diskusi dan ide-ide yang dihasilkan di sini akan berdampak jangka panjang pada upaya kita bersama untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik dan melindungi kepentingan nasional,” kata Wamenhan Harindra mengakhiri sambutannya.

Waka BRIN: Keamanan Maritim adalah Kepentingan Bersama



Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Waka BRIN) Laksdya TNI (Purn) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., IPU., ASEAN.Eng. berpendapat bahwa keamanan maritim adalah kepentingan bersama semua kawasan. Apalagi kawasan perairan Indo-Pasifik yang membentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik adalah salah satu yang terbesar di dunia.

“Indo-Pasifik terdiri dari banyak negara yang tersebar di beberapa kawasan. Keamanan maritim merupakan kepentingan bersama semua kawasan, dan sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekosistem laut,” kata Waka BRIN saat memberikan pidato kunci sesi empat kegiatan Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta (26/9).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam laut memiliki potensi yang sangat besar untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Meski demikian, saat ini terdapat banyak ancaman keamanan maritim tradisional dan kontemporer.

“Ancaman keamanan maritim tradisional merujuk pada berbagai bentuk aktivitas kriminal. Laut merupakan media untuk pembajakan, perampasan, perdagangan pasar gelap, penyelundupan, imigrasi ilegal, terorisme maritim, dan IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing,” kata Waka BRIN.

Kemudian, ancaman keamanan maritim kontemporer berorientasi pada dampak negatif terhadap lingkungan laut akibat kerusakan ekosistem, pencemaran laut, dan polusi udara di atas laut, terutama yang disebabkan oleh limbah plastik dan zat beracun berbahaya yang sering ditemukan di dasar laut dan dalam perut ikan, terumbu karang, serta berbagai flora laut.

“Ancaman keamanan maritim dari aktor-aktor negara juga muncul dalam bentuk kontestasi dalam konflik perbatasan maritim, yang mengarah pada perang hibrida. Jenis perang baru ini menggabungkan kapal perang yang diawaki oleh tentara dan sistem tanpa awak yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan,” imbuh Waka BRIN.

Sampai saat ini, belum banyak negara atau organisasi internasional yang mendorong kerja sama antara angkatan

laut dan penjaga pantai untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut. Oleh karena itu kolaborasi dan kerja sama internasional diperlukan untuk meminimalkan jumlah kejahatan dan mencapai kesepakatan tentang aturan internasional yang tepat untuk penggunaan sistem tak berawak dan mencegah penyalahgunaan kecerdasan buatan.

Dalam pidatonya, Waka BRIN mengatakan bahwa geomaritim dapat digunakan sebagai kerangka kerja, skema, dan mekanisme kerja sama keamanan maritim untuk mencegah, mengatasi, dan memitigasi segala bentuk ancaman tradisional dan kontemporer dari aktor-aktor negara, non-negara, dan aktor yang disponsori oleh negara.

“Geomaritim menjadi landasan ilmiah bagi upaya bersama untuk memberdayakan laut sebagai sumber pangan, bahan baku obat-obatan, air minum bersih, dan energi,” ucap Waka BRIN.

Selain itu, geomaritim juga berperan sebagai perspektif hukum dalam merumuskan berbagai aturan internasional yang bertujuan untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi tentang pemberdayaan laut serta pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan

Waka BRIN juga menjelaskan bahwa geopolitik modern diadopsi oleh banyak negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing. Seperti dalam pemikiran geopolitik klasik, geopolitik modern lebih menekankan pada pengaruh politik untuk mencapai kepentingan nasional daripada dominasi angkatan bersenjata.

Dalam geopolitik modern juga, geoeкономи tidak hanya mencakup optimalisasi sumber daya alam laut, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kelestarian ekosistem untuk kesejahteraan rakyat.

J
JAKARTA



Foto. BPMI Setpres

Selamat Datang **DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.SI.**

Bertempat di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto melantik Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. sebagai Gubernur Lemhannas RI pada Selasa 22 Oktober 2024. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 146 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Surat Keputusan tersebut ditetapkan oleh Presiden RI di Jakarta pada 21 Oktober 2024 dan dibacakan oleh Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti pada pelaksanaan di Istana.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. mengucapkan sumpah jabatan. Kemudian dalam kesempatan tersebut Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. juga mengucapkan sumpah

bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.

Usai pelantikan Gubernur Lemhannas RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyampaikan amanatnya yang akan diemban saat memimpin Lemhannas RI. Dalam bidang pendidikan, Lemhannas RI harus mengarahkan para pemimpin nasional agar memiliki arah yang sama menuju cita-cita bangsa. Kemudian Lemhannas RI harus memberikan masukan dan menjadi lembaga think tank bagi Presiden dan memberikan masukan yang terkait dengan isu-isu geopolitik. “Kami punya kewajiban memberikan masukan-masukan sebagai lembaga think tank,” kata Gubernur Lemhannas RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M. Si.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menekankan pentingnya peran Lemhannas RI dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka menjaga ketahanan nasional ditengah arus globalisasi dan digitalisasi. “Saya berharap dan mohon doa seluruh masyarakat agar

kami dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. saat ditemui awak media.

Gubernur Lemhannas RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. tercatat pernah berperan aktif dalam berbagai organisasi seperti menjadi Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda ANSOR di bawah Kepemimpinan Nusron Wahid dan menjadi Ketua bidang Pemuda Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) tahun 2010-2015. Selain itu, Gubernur Lemhannas RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. juga pernah tercatat sebagai ketua GEMA MKGR.

Kemudian Gubernur Lemhannas RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. tercatat pernah mengemban amanat sebagai Anggota DPR RI pada tahun 2013 dan menjadi Anggota Komisi VIII yang membidangi Agama dan Sosial. Sedangkan pada tahun 2016, Gubernur Lemhannas RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. kembali menjadi Anggota DPR/MPR RI pada Komisi II yang membidangi politik dalam negeri.



Selamat Bertugas
**Dr. H. TB. ACE HASAN
SYADZILY, M.Si.**

Sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia



PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

GUBERNUR LEMHANNAS RI BERI ARAHAN DI KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI ANGGOTA DPD RI PERIODE 2024-2029



Hari pertama bekerja sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si melakukan pengecekan seluruh ruangan kantor Lemhannas RI. Setelah melakukan pengecekan kantor Lemhannas RI, Ace Hasan melanjutkan kegiatannya dengan meninjau dan memberikan pengarahannya kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPD RI Periode 2024-2029 yang didampingi oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra, M.Si. dan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Mayjen TNI Rido Hermawan di Grand Ballroom Hotel Shangrila Jakarta, pada Rabu (23/10).

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan rasa bahagianya dapat bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan seluruh anggota DPD RI terpilih dalam sistem konstitusi sebagai lembaga negara. Acara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan sejak dua hari yang lalu, banyak menggali ilmu dari para instruktur Lemhannas RI, juga menstimulasi gagasan-gagasan dari para peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPD RI.

Tentang persepsi terhadap nilai-nilai kebangsaan yang kerap berbeda, Gubernur Lemhannas RI menegaskan pentingnya peran Lemhannas RI untuk menggali dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang mau dituju oleh Bangsa Indonesia. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto pada saat Pidato Kenegaraan, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa dengan berakhirnya perang dingin, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang bukan hanya terkait Geopolitik, melainkan menghadapi fenomena baru, yaitu the end of ideology.

Konsep sekarang bukan saja melihat konsep Geopolitik dan Geostrategi, namun kekuatan yang harus dibangun dalam persaingan ekonomi persaingan politik tetap harus mendahulukan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Lemhannas RI sebagai lembaga yang diberi tugas oleh negara untuk memperkuat nilai kebangsaan, akan memfasilitasi nilai kebangsaan untuk mewujudkan suatu persepsi, cita-cita, kesadaran, dan komitmen yang kuat bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal ini bagi anggota DPD RI yang memiliki peran strategis dari seluruh daerah di Indonesia.

“Kita lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini ditujukan untuk terus memantapkan nilai-nilai kebangsaan ditengah dinamika dan situasi Politik eksternal, baik persaingan ekonomi global, perubahan iklim, maupun perang dagang dan sebagainya, maka kita memperkuat interest nasional atau tujuan nasional kita,” ungkap Gubernur Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin turut menyampaikan bahwa Lemhannas RI hadir untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Sultan Bachtiar juga berharap dengan nilai-nilai kebangsaan yang terus dimantapkan oleh Lemhannas RI, anggota DPD RI akan sepenuhnya memahami hak, tugas, dan tanggung jawabnya yang bukan hanya sebagai anggota DPD RI tetapi juga sebagai warga negara Indonesia. “Karena anggota DPD itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat daerah, kalau anggota DPD mantap, (dan) paham sepenuhnya tugas sebagai warga negara, insya allah negara ini aman, NKRI aman, daerah-daerah semangat membangun, (dan) isu-isu tentang NKRI yang katanya tidak utuh itu menjadi tidak ada,” kata Sultan Bachtiar.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai.





Relevansi Ketahanan Nasional dalam Tata Kelola Pemerintahan

Ni Made Vira Saraswati, S.Sos., M.Sc.

Penelaah Teknis Kebijakan Ditjian Ideologi dan Politik Debidjianstrat Lemhannas RI

Pada pendirian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas, kala itu bernama Lembaga Pertahanan Nasional) pada tahun 1965, Presiden Soekarno menyebutkan Lemhannas (lembaga pertahanan) sebagai sekolah geopolitik yang bertujuan sebagai sarana pendidikan dan pengkajian masalah strategik untuk mencapai tujuan nasional. Istilah ‘ketahanan nasional’ sendiri muncul setelahnya, seiring dengan kondisi politik-sosial pada masa tersebut, yang lebih menekankan upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konsep ini kemudian berkembang dengan pendefinisian ketahanan nasional sebagai keuletan dan daya tahan dalam menghadapi segala ancaman dari dalam maupun dari luar yang membahayakan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Sejak berdirinya Lemhannas, ketahanan nasional diajarkan kepada para calon pemimpin nasional sebagai sebuah doktrin nasional (landasan konseptual), sementara dalam ranah pengkajian strategik dibedakan isu-isu kajian berdasarkan 8 gatra (astagrata) yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan (hankam).

Menurut Lemhannas, ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan (astagrata), berisi keuletan dan ketangguhan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATGH). Dalam definisi ini tersurat bahwa ketahanan nasional adalah sebuah keadaan, kondisi berproses dalam pencapaian tujuan nasional dengan

pengembangan kekuatan di segala aspek (astagrata) dan memitigasi ATHG. Kondisi berproses ini tidak hanya internal (nasional, inward looking) tetapi juga eksternal (internasional, outward looking) yang keduanya saling berkaitan sehingga melahirkan landasan visional ‘wawasan nusantara’ yang menjadi pandangan geopolitik Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Konsep ketahanan nasional merupakan konsep multidimensional yang sangat luas karena berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan bangsa.

Dalam ranah akademis, sekitar tahun 1980-an berdiri sekolah kajian dan program studi ketahanan nasional yang berkontribusi dalam pengembangan konsep ketahanan nasional secara keilmuan. Hal ini berkorelasi positif dengan pengembangan ketahanan nasional sebagai sebuah ilmu dalam ranah akademik sehingga ketahanan nasional

tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Disebutkan dalam buku ‘Ketahanan Nasional: Teori, Adaptasi, dan Strategi’ oleh Margaretha Hanita (2020), ilmu ketahanan berkembang dari monodisipliner menjadi transdisipliner. Transdisipliner ilmu ketahanan ini sesuai dengan konteks ketahanan nasional sebagai landasan konseptual yang telah dikembangkan Lemhannas.

Bagaimana dengan pengembangan ketahanan nasional pada ranah tata kelola pemerintahan sebagai penentu dan pelaksana kebijakan negara? Dalam prosesnya, ketahanan nasional pada ranah tata kelola pemerintah masih bersifat sektoral pada masing-masing gatra misalnya ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, atau ketahanan keamanan. Sedangkan secara akademis telah dikaji bahwa ketahanan nasional bersifat transdisipliner yang seharusnya pendekatan dalam pemerintahan bersifat

Grafis 1. Ketahanan Nasional, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kajian



Sumber: Diolah dari pemikiran-pemikiran Gubernur Lemhannas RI 2001 - 2024

transgatra (lintas gatra). Relevansi ketahanan nasional dalam tata kelola pemerintah hanya sebatas pemantauan sektoral per gatra, sementara sifat ATHG sekarang ini kompleks, saling berkaitan, ambigu, tidak linear (tidak terpola, sporadis), dan sulit dimengerti (VUCA: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity dan BANI: brittle, anxiety, non-linear, incomprehensible). Kasus Covid-19 misalnya tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan yang termasuk dalam gatra sosial-budaya, tetapi juga berhubungan dengan kondisi ekonomi negara (gatra ekonomi), kondisi geografi dan demografi Indonesia dalam penentuan penanganan, kondisi politik dan keamanan dalam penjagaan arus masuk migrasi ke dalam dan ke luar negeri, serta geopolitik vaksin yang hanya mampu diproduksi negara-negara maju (gatra politik dan hankam).

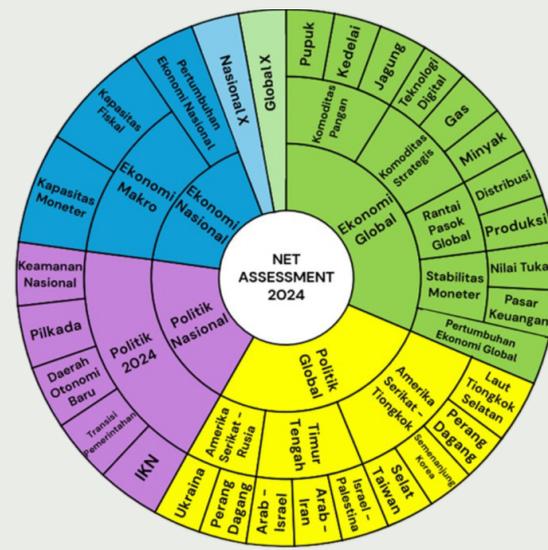
Pada tahun 2023, Gubernur Lemhannas RI merumuskan relevansi ketahanan nasional dalam tata kelola pemerintahan dengan mengembangkan konsep kerangka kerja ketahanan nasional dalam tata kelola pemerintahan yaitu kerangka kerja institusi dan kerangka kerja pengelolaan krisis. Kerangka kerja institusi meliputi tata kelola pemerintahan dalam mengelola transgatra dan pengembangan kekuatan nasional yang terdiri dari doktrin, regulasi, kelembagaan, pengembangan operasional, alokasi sumber daya, dan teknologi. Kerangka kerja pengelolaan krisis merupakan upaya keuletan dan ketangguhan yang terdiri dari tata kelola kelembagaan krisis, manajemen risiko, manajemen krisis, pemulihan cepat, dan berkelanjutan.

Sejak tahun 2023 Deputi Bidang Pengkajian Strategik (Debidjianstra) Lemhannas RI melakukan kajian rutin yaitu Kajian Risiko Krisis sebagai salah satu upaya pengelolaan krisis, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Debidjianstrat untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden RI sebagai pengelola negara dan pemerintahan. Kajian Risiko Krisis yang dilakukan menggunakan pendekatan transgatra yang mengkaji 31 indikator (grafis 2). Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian indikator menjadi 30 indikator (grafis 3). Untuk tahun 2025, telah dilakukan pre kajian proyeksi isu 2025 dan melahirkan 45 indikator (grafis 4). Kajian risiko krisis ini dilakukan menggunakan metode net assessment yaitu metode pengukuran risiko untuk menggambarkan kondisi riil yang telah berlangsung dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Setiap tahun, selain penyesuaian indikator, juga dilakukan penyesuaian metode pengumpulan dan analisa data untuk meningkatkan kualitas hasil kajian dan rekomendasi kepada Presiden RI. Peningkatan kualitas kajian Debidjianstrat juga dilakukan pada kajian-kajian lain yang bersifat kajian strategik dalam kerangka kerja institusi. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas kajian Debidjianstrat, Lemhannas dapat memberikan dampak dan kontribusi bagi pembangunan nasional dan pencapaian Indonesia Emas 2024.

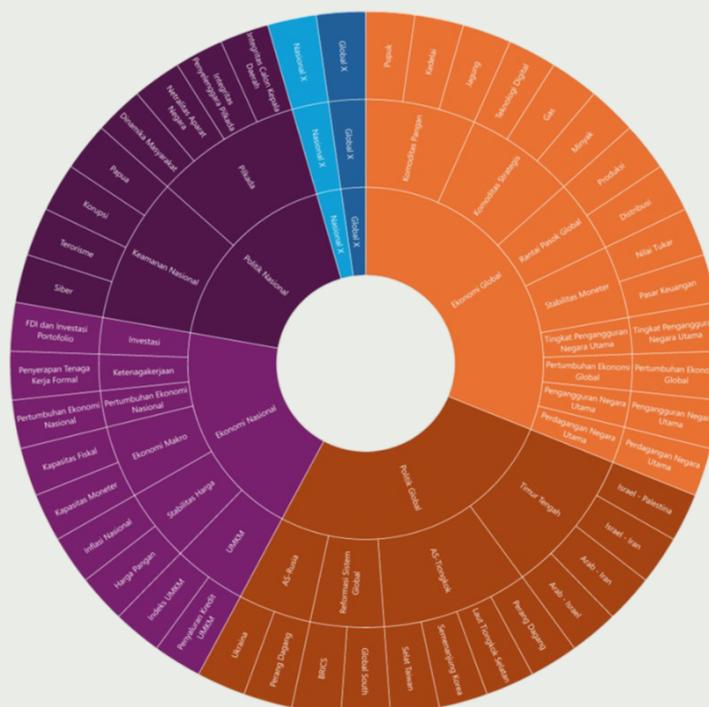
Grafis 2. Variabel dan Indikator Kajian Risiko Krisis 2023



Grafis 3. Variabel dan Indikator Kajian Risiko Krisis 2024



Grafis 4. Variabel dan Indikator Kajian Risiko Krisis 2025



Wilayah Laut dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Wawasan Nusantara

Laksamana Muda TNI Sawa, S.E., M.M., CIQaR.

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas RI



Sebagai negara dan bangsa dengan kondisi geografis berupa kepulauan (kumpulan pulau), Indonesia yang dahulu disebut Nusantara tentu memiliki hal-hal khusus apabila dibandingkan dengan negara dan bangsa lain terutama terkait dengan pengelolaan wilayah lautnya. Diskusi terkait dengan wilayah laut sudah berlangsung lama dan terus mengemuka seiring dengan perkembangan hukum laut internasional sejak abad XVI-an hingga saat ini. Adanya Otonomi Daerah sebagai bagian dari kehendak Reformasi 1998 juga mempengaruhi tata kelola wilayah laut Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan mengelola laut sejauh 12 NM dari garis pantai provinsinya mengarah ke Laut Lepas atau Perairan Kepulauan¹. Dengan demikian maka ada kesan bahwa tiap provinsi memiliki laut tersendiri yang terpisah dengan provinsi lainnya. Hal ini pada beberapa kejadian menjadi pemicu konflik

antar nelayan yang berasal dari provinsi yang berbeda terkait dengan penangkapan ikan pada wilayah laut tertentu.

Pada sisi lain, Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD NRI 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sebagai Geopolitik, hakikat dari Wawasan Nusantara adalah sebagai kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional². Tulisan ini akan mendudukan pemahaman yang tepat atas pengelolaan wilayah laut dalam Otonomi Daerah dihadapkan pada Wawasan Nusantara.

a. Sejarah Hukum Laut.

Secara umum, perkembangan hukum laut di Indonesia merupakan perpaduan dari

perkembangan hukum laut internasional dan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia sendiri. Apabila kita bagi secara waktu, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 era yaitu: Pertama, era sebelum Perang Dunia ke-II (Abad XVI – 1945); Kedua, era berakhirnya Perang Dunia ke-2 hingga tercapainya kesepakatan Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS, 1982); Ketiga, era jeda berlakunya UNCLOS 1982 hingga berlaku pada tahun 1994; dan keempat, era modern hingga saat ini. Pada kurun waktu antara Abad XVI hingga Perang Dunia ke-II, perdebatan tentang kewenangan atas laut sering mengemuka akibat dari perebutan atas potensi ekonomi dan sumber kekayaan alam di laut. Kejadian yang menonjol adalah ketika Perusahaan Dagang Belanda (VOC; Vereenigde Oostindische Compagnie), merampas kapal dagang milik Portugis yang sedang lego jangkar di Selat Singapura pada tahun 1603³. Akar permasalahan dari perebutan kapal tersebut adalah adanya keinginan VOC untuk mengakhiri monopoli perdagangan rempah-rempah dari Nusantara oleh Portugis.

¹ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 Ayat 3.

² Hanjar Lemhannas RI BS Wawasan Nusantara, 116.

³ Mónica Brito Vieira, "Mare liberum vs. Mare clausum: Grotius, Freitas, and Selden's debate on dominion over the seas" (2003) 64(3) Journal of the History of Ideas 361, 361.

Kejadian tersebut kemudian menjadi perdebatan yang berlarut di negara-negara Eropa tentang kewenangan atas laut. Guna membela tindakan VOC tersebut, seorang ahli hukum Belanda bernama Huigh De Groot atau lebih dikenal dengan nama Hugo Grotius, menulis pamphlet dengan judul *Mare Liberum Sive de Iure Quod Batavis Competit ad Indicana Commercium* atau secara singkat dalam Bahasa Inggris disebut *Freedom of the Sea* (faham kebebasan atas laut)⁴. Grotius berpendapat bahwa berdasarkan asas universalitas, sebuah negara bebas berdagang dengan negara manapun. Menjawab tulisan Grotius ini, beberapa ahli diantaranya Serafim De Freitas dari Portugis dan John Selden dari Inggris menyangkal dan berpendapat bahwa laut bukanlah bebas dan penguasa daratan bisa menguasai laut. Dalam bukunya yang berjudul *Mare Clausum*, John Selden berpendapat bahwa laut bisa dikuasai sebagaimana daratan dan penguasa daratan berhak menentukan aturan-aturannya di laut.

Menggabungkan 2 (dua) pemahaman yang bertolak belakang ini, seorang ahli dari Belanda, Cornelius Van Bynkershoek, pada tahun 1703 mengemukakan teori "cannon shot rule" dan diterima oleh banyak negara pada abad XVII-an⁵. Sesuai dengan teori tersebut, maka kewenangan negara pantai atas lautnya dibatasi sejauh 3 NM karena rata-rata jarak tembak meriam pada saat itu adalah 3 NM. Paham ini dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia saat itu yang masih berada di bawah Pemerintah Belanda dengan TZMKO (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*) atau Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritimnya yang mengatur bahwa laut teritorial adalah 3 NM dari daratan. Dengan demikian maka setiap pulau di Nusantara saat itu memiliki laut teritorial yang hanya sejauh 3 NM.

Diskusi berikutnya berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan banyaknya negara baru setelah Perang Dunia ke-II. Tuntutan negara-negara pantai untuk memiliki kewenangan atas laut yang mengelilingi daratannya makin kuat. Indonesia saat itu berada pada kelompok yang memperjuangkan claim Negara Kepulauan bahwa selat antar pulau bukanlah pemisah tapi menjadi satu bagian dari daratan sesuai Deklarasi Juanda 1957. Claim ini akhirnya berhasil dengan disepakatinya Konvensi Hukum Laut Internasional PBB atau lebih dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun

1982, dan konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1994 yang mengategorikan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar sehingga perairan diantara pulau-pulau di Indonesia bukanlah pemisah tapi menjadi satu bagian dengan daratan yang ada⁶. Berlakunya UNCLOS 1982 ini, terutama pada Bab IV yang mengatur tentang Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), merupakan keberhasilan Bangsa Indonesia dalam perjuangan diplomasi internasional yang panjang, cerdas, dan sangat strategis sebagai sebuah bangsa.

Kewenangan Pemerintah Provinsi atas Laut di Provinsinya

Otonomi Daerah (Otda) yang merupakan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang harus diakui merubah beberapa sendi kehidupan Bangsa Indonesia termasuk tentang pengelolaan laut. Perairan Kepulauan yang semula menjadi satu dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan UU 17/1985, dalam pengelolaannya menjadi terpisah-pisah dengan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Sesuai pasal 27 UU 23/2014, Pemprov diberi kewenangan untuk mengelola laut sejauh 12 NM dari daratannya. Kewenangan ini meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Apabila wilayah laut antar dua provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) NM, kewenangan untuk mengelola sumber kekayaan alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi tersebut. Ketentuan tentang kewenangan Pemprov sejauh 12 NM tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Apabila kita lihat sepintas pasal 27 UU 23/2014 tersebut, maka sepertinya setiap provinsi punya laut sendiri-sendiri sehingga Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial Indonesia terkotak-kotak dalam kewenangan masing-masing Pemprov, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada hal-hal yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu pengelolaan minyak dan gas bumi; keamanan laut dan

kedaulatan negara. Pasal 27 secara jelas menyebut bahwa ketiga hal tersebut bukan kewenangan Pemprov. Dalam hal keamanan laut dan kedaulatan negara, Pemprov hanya berperan "ikut serta" dan bukan sebagai penyelenggara. Hal yang krusial lainnya adalah terkait hak penangkapan ikan. Secara jelas bahwa penangkapan ikan oleh nelayan kecil tidak mengenal kewenangan Pemprov sejauh 12 NM tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi adanya bentrokan antar nelayan yang merasa menguasai kawasan penangkapan ikan sesuai provinsinya dan melarang nelayan dari provinsi lain untuk menangkap ikan di laut yang di-claim sebagai kewenangan provinsinya.

Kesimpulan

Otonomi Daerah pada dasarnya tidak merubah Wawasan Nusantara, namun harus diakui bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bisa disalahtafsirkan oleh pihak tertentu atau para pemangku kepentingan yang tidak menelaah Undang-undang tersebut dengan seksama. Pemerintah Provinsi tidaklah mutlak (berdaulat) atas 12 NM laut provinsinya, kewenangan Pemerintah Provinsi berupa pengelolaan pada beberapa hal saja. Kewenangan terkait minyak dan gas bumi; keamanan laut; dan kedaulatan negara masih sesuai dengan Wawasan Nusantara yaitu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian Wawasan Nusantara yang menjadi cara pandang atas wilayah Indonesia yang melihat bahwa laut bukan pemisah, tapi sebagai pemersatu tetaplah nyata adanya dan tidak bertentangan dengan Otonomi Daerah.

Pemahaman terhadap Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah masih perlu terus disosialisasikan, mengingat adanya potensi konflik, perpecahan dan hal-hal merugikan lainnya akibat salah tafsir. Apabila kesalahan tafsir tersebut berkembang secara masif, maka perjuangan panjang Bangsa Indonesia dengan Deklarasi Juanda tahun 1957, diplomasi internasional dari tahun 1957 hingga disepakatinya UNCLOS pada tahun 1982, dan perjuangan untuk mendapatkan 60 negara peratifikasi sebagai syarat UNCLOS 1982 berlaku yang baru tercapai pada tahun 1994 (setahun setelah Guyana meratifikasi UNCLOS) akan menjadi sia-sia. Dan tentu, kita sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia tidak mau kembali ke era laut terkotak-kotak dengan "cannon shot rule" nya.

⁴ Gustaaf Van Nifferik dan Janne Nijman, "Introduction: Mare Liberum Revisited (1609- 2009)" (2009) 30 (1) *Grotiana* 3, 3.

⁵ John G. Butcher dan Robert Edward Elson, *Sovereignty and the sea: How Indonesia became an archipelagic state* (NUS Press, 2017), 3.

⁶ UNCLOS 1982, Pasal 47.



Potensi malapetaka persaingan Strategis China-AS di Kawasan Indo-Pasifik **Siapakah Indonesia menghadapinya?**

Mayjen TNI (Purn.) Endang Hairudin, S.T., M.M.

Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan
Nusantara Lemhannas RI

Competition is the Law of the Jungle, but Cooperation is the Law of Civilization

(Peter Kropotkin)

Ambisi dan agresivitas China berbenturan dengan kepentingan AS dan negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik. Persaingan strategis China-AS di Kawasan bisa memicu perang proksi guna menghindari keterlibatan mereka secara langsung. Jika terjadi perang maka akan menambah malapetaka kemanusiaan dan kehancuran ekonomi global karena saat ini dunia masih didera perang antara Russia-Ukraina yang didukung AS dan NATO, serta perang antara Palestina yang faksinya didukung Iran dengan Israel yang didukung AS dan beberapa negara Eropa. Memang tragis dalam zaman yang selalu digembargemborkan tentang perdamaian, demokrasi, penegakan hukum internasional dan hak asasi manusia justru terjadi perang di setiap Kawasan dunia, yang notabene dimotori dan dibiayai oleh negara-negara yang katanya cinta damai dan kemerdekaan.

Bagaimana ambisi dan agresivitas China di Kawasan Indo-Pasifik?

Kebangkitan China menjadi kekuatan ekonomi dan militer global tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses sejak Deng Xiaoping (1978) dengan visi strategisnya "Socialism With Chinese Characteristics" yang mereformasi sistem ekonomi sehingga pada 2010 Ekonomi China tumbuh menjadi ke-2 terbesar di dunia, dan pada 2015 menjadi pusat aktivitas ekonomi dunia. Pembangunan China terus berlanjut di bawah Xi Jinping (2017) dengan visi strategisnya "Socialism With Chinese Characteristics For A New Era" yang mencanangkan dalam 2020-2035 akan mewujudkan modernisasi sosialis dan menjadi negara inovatif, dan dalam 2035-2050 akan membangun "Great Modern Socialist Country" untuk menjadi bangsa berpengaruh Global dan aktor dominan dalam ekonomi, sehingga pada 2050 China memiliki pemerintahan

yang baik, stabil secara sosial, makmur secara ekonomi, maju secara teknologi serta kuat secara militer akan mampu mengendalikan kepemimpinan regional dan global dalam arsitektur ekonomi, keamanan dan kendali atas wilayah yang diklaim.

Untuk mewujudkan kerja sama internasional yang bermuara pada reformasi sistem internasional, China membuat konsep tata dunia "masyarakat dengan masa depan kemanusiaan bersama" melalui konsensus internasional: One Belt One Road (OBOR), Global Development Initiative, Global Security Initiative dan Global Civilization Initiative. OBOR yang diprakarsai oleh Xi (2013) dan diubah menjadi Belt and Road Initiative, tidak hanya Jalur sutra melalui daratan yang menghubungkan Asia dengan Eropa, tetapi juga Maritime Silk Road dan Polar Silk Road sehingga sampai saat ini telah bergabung 147 negara



dalam OBOR. Selain itu China telah mengembangkan Digital Silk Road (DSR) untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara disepanjang OBOR dalam pembangunan infrastruktur internet, ekonomi digital dan keamanan siber, sehingga DSR menjadi China's Geopolitics of Cyberspace.

Dalam strategi militer untuk melindungi kepentingannya, China telah membangun 3 kapal induk, sejumlah pesawat tempur canggih dan peluru kendali antar benua dengan hulu ledak nuklir. Untuk mendukung kehadiran militernya di Indo Pasifik, China telah membentuk 3 Island Chain yang membentang di Samudra Pasifik dan 2 Island Chain di Samudra Hindia, sehingga memungkin armada Angkatan laut dan pesawat tempurnya beroperasi di Kawasan. Tentunya hal ini menjadi ancaman besar bagi dominasi AS yang ingin menegakan kebebasan dan terbukannya wilayah Indo Pasifik untuk navigasi pelayaran dan penerbangan militer internasional.

Dengan kekuatan ekonomi dan militernya, China melakukan ekspansi wilayah di laut China Selatan (LCS) dengan menggunakan 9 garis putus-putus yang berdasarkan sejarah nenek moyangnya, sehingga menyebabkan sengketa dengan beberapa negara seperti Philipina dan Vietnam, dimana garis tersebut juga memasuki wilayah ZEEI di Kepulauan Natuna. Selain itu di Laut China Timur terjadi sengketa kepulauan dengan Jepang, dan China membentuk Air Defense Identification Zone (ADIZ) yang memotong ADIZ Korea Selatan dan Jepang. Terakhir pada

Oktober 2023 China menerbitkan peta baru dengan merubah 9 garis putus-putus menjadi 10 di LCS dan peta inipun memasukan sebagian wilayah India dan Russia yang berbatasan dengan China. Peta baru China menjadi ancaman nyata bagi negara-negara di Kawasan termasuk Taiwan yang dianggap sebagai wilayah yang tak terpisahkan dari China.

Tekanan militer China semakin intens terhadap Taiwan yang berpenduduk 23 juta dalam beberapa tahun terakhir dan cenderung bertepatan dengan peristiwa yang membuat marah Beijing, seperti pada Agustus 2022 atas kunjungan Ketua DPR AS ke pulau tersebut, dan setelah pidato Presiden Taiwan pada Oktober 2024 bahwa pulau itu "tidak tunduk" kepada China, dan Beijing "tidak memiliki hak untuk mewakili Taiwan." China merespon bahwa "kemerdekaan Taiwan dan perdamaian di Selat Taiwan tidak sejalan, dan provokasi pasukan kemerdekaan Taiwan pasti akan dilawan."

Mengapa AS sangat berkepentingan di Kawasan Indo-Pasifik?

Dalam mempertahankan dominasi dan hegemoninya dari pengaruh China, AS mempertegas visi strategisnya di Kawasan Indo-Pasifik. Beberapa kebijakan dan strategi tersebut antara lain membentuk QUAD yang terdiri dari AS, Jepang, Australia dan India sebagai respons terhadap peningkatan kekuatan ekonomi dan militer China, kemudian "Pivot to East Asia" serta "Rebalance to Asia-Pacific" karena dianggap Kawasan ini telah menjadi pusat gravitasi politik

dan ekonomi dunia. Selanjutnya AS menekankan tentang pentingnya "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka", dan dengan semakin intensifnya aktivitas militer China di Kawasan, AS membentuk aliansi AUKUS (Australia, United Kingdom dan AS) untuk memperkuat kemampuan militer masing-masing negara dalam mendukung kepentingan keamanan dan pertahanan di Kawasan. Dalam kerjasama ekonomi, setelah AS keluar dari Trans-Pacific Partnership kemudian membentuk Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity bertujuan untuk berkontribusi pada kerja sama, stabilitas, kemakmuran, pembangunan, dan perdamaian di Kawasan.

Kebijakan dan strategi AS tersebut diatas belum mampu membendung ambisi maupun menyurutkan ekspansi China, seperti halnya China tetap menekan Philipina dengan kekuatan politik dan militer secara terbatas atas sengketa di kepulauan Spratly, walaupun pada 2016 Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di LCS. Untuk mencegah konflik di kawasan, AS meningkatkan kerjasama militer antara lain menambah 4 pangkalan militer di Philipina dan latihan militer bersama AS, Filipina, Korea Selatan dan Jepang. Konflik militer antara China-Philipina tingkat kemungkinan terjadinya rendah dan dampaknya rendah terhadap instabilitas Kawasan.

Namun lain halnya dengan Taiwan yang pulau tersebut dianggap sebagai bagian dari China. China terus meningkatkan tekanan politik, ekonomi dan militer yang mendorong keterlibatan AS dan sekutunya, walaupun AS tidak berkewajiban membela Taiwan karena bukan negara sekutunya, tetapi AS memiliki kepentingan strategis keamanan dan pertahanan, karena Taiwan terletak dalam rangkaian 1st Island Chain yang menjadi jangkar pertahanan AS. Jika Taiwan dicaplok China, maka akan membatasi operasi militer AS, selain itu AS akan kehilangan kepercayaan dari sekutunya sehingga lebih sulit mencegah dominasi China di Kawasan. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, Washington merupakan pendukung internasional dan pemasok senjata terbesar bagi Taipei seperti pada akhir September 2024 lalu, AS

menyetujui bantuan militer senilai \$567 miliar, dengan dukungan tersebut Beijing menuduh Washington mencampuri urusan internalnya.

Bila China menyerang Taiwan, terlepas dari keberhasilannya atau apakah AS akan membantu Taiwan tetap akan memicu depresi ekonomi global. Karena Taiwan merupakan produsen hampir 70% semikonduktor dunia dan chip paling canggih, sehingga kemungkinan dalam jangka waktu pendek tidak ada perusahaan lain yang mampu mengisi kesenjangan tersebut, maka akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan di berbagai industri harus mengurangi atau bahkan menghentikan produksi mereka. Meskipun konfrontasi militer di Selat Taiwan tidak akan segera terjadi, namun dengan semakin meningkatnya tekanan China terhadap Taiwan, ada pendapat yang memperkirakan bisa terjadi perang pada 2027. Konflik militer antara China-Taiwan tingkat kemungkinan terjadinya sedang namun bila terjadi konflik militer dampaknya tinggi terhadap instabilitas Kawasan dan global.

Siapkah Indonesia menghadapi kemungkinan perang di Kawasan Indo-Pasifik?

Persaingan China-AS sewaktu-waktu bisa menimbulkan malapetaka di Kawasan Indo-pasifik. Perang akan mengakibatkan bencana kemanusiaan, kehancuran perekonomian, terjadi fragmentasi geopolitik negara-negara yang terlibat konflik, serta berdampak langsung

terhadap Kawasan dan global. Seperti halnya perang Russia-Ukraina dan perang Israel-Palestina terjadi pengelompokan negara-negara yang mendukung pihak yang bertikai, terganggunya suplai energi dan pangan, terjadi pengungsi masal yang membanjiri negara tetangga. Selain itu ada kemungkinan wilayahnya digunakan untuk kepentingan lalu lintas militer, walaupun ada beberapa negara seperti Jordania dan Arab Saudi melarang wilayah udaranya digunakan oleh pihak yang berkonflik.

Indonesia yang berada pada Sea Lane of Communication dan Sea Lane of Trade yang merupakan crucial highway untuk jalur navigasi pelayaran dan perdagangan, apabila terjadi perang China-Taiwan yang didukung AS dan sekutunya akan berdampak buruk terhadap perekonomian dan politik Indonesia. Selain itu sebagai negara kepulauan yang letaknya berbatasan langsung dengan LCS kemungkinan besar akan dibanjiri pengungsi dari Taiwan yang menghindari bencana perang, dan ada kemungkinan digunakannya Alur Laut Kepulauan Indonesia oleh armada perang AS dan sekutunya. Untuk ini Indonesia harus mempunyai rencana kontijensi dalam menghadapi semua hal tersebut, dan berani menolak penggunaan wilayahnya oleh pihak yang terkait dalam konflik.

Fragmentasi geopolitik kawasan akan berdampak pada Indonesia yang memiliki kepentingan politik, ekonomi dan militer dengan China maupun AS. Namun dengan politik bebas aktif-nya, diharapkan

Indonesia mampu beradaptasi dan fleksibel terhadap perkembangan situasi kawasan, dan kerjasama merupakan pilihan terbaik daripada keberpihakan dalam persaingan 'Zero-sum Games', terlebih lagi jangan sampai Indonesia menjadi proxy atau pion dari persaingan 'Great Power'. Oleh karena itu untuk mencegah ketidakstabilan Geopolitik dan keamanan akibat persaingan China-AS di Kawasan. Diharapkan persaingan China-AS agar tetap menghormati sistem internasional untuk kedaulatan suatu negara, persamaan hak dan nonintervensi; tidak menggunakan kekuatan militer dalam menciptakan tata pemerintahan global; tidak membuat ultimatum serta mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kemudian persaingan China-AS agar tetap menghormati hak negara lain untuk memilih secara mandiri masa depan mereka berdasarkan tradisi dan latar belakang peradaban masing-masing, serta dibangunnya hubungan yang konstruktif antar negara berdasarkan saling percaya dan menghormati.

Bagi Indonesia persaingan China-AS di kawasan harus diperhitungkan menjadi kondisi obyektif dalam merumuskan dan membuat kebijakan kepentingan nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus membangun dan memiliki kekuatan pertahanan yang memadai guna melindungi kepentingannya, serta sebagai antisipasi memburuknya situasi politik dan keamanan di Kawasan. Disamping itu selain sebagai Deterrence Effect juga untuk mendukung diplomasi, karena "tanpa kekuatan militer, diplomasi akan kehilangan makna". Sebagai salah satu pendiri dan anggota ASEAN, Indonesia diharapkan mampu menjaga soliditas ASEAN agar bisa beradaptasi dalam persaingan China-AS yang dapat memecah ASEAN; dan berperan untuk menurunkan eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik.



Foto. telecomreview.com



Brigadir Jenderal Polisi Drs.

I GEDE MEGA SUPARWITHA

“...berusaha menjadi baik, bahkan dalam keadaan terburuk, bukan mengejar pengakuan, tapi menjadi versi terbaik diri sendiri...”

I GEDE MEGA

Brigjen Pol. Drs. I Gede Mega Suparwitha, M.Si., dilahirkan di Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan 56 tahun yang lalu. Saat itu, tidak ada fasilitas rumah sakit, sehingga beliau dilahirkan dengan bantuan seorang dukun beranak. “Dukun beranak pada masa tersebut diandalkan bahkan dihormati karena keterampilannya membantu persalinan meski mereka belajar secara otodidak. Begitulah saya dilahirkan,” ujar pria yang saat ini menjabat Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lemhannas RI.

I Gede Mega adalah anak sulung dari tiga bersaudara. "Saya memiliki dua saudara; saudara laki-laki saya seorang tentara tamatan sekolah Bintara Jasmani Cimahi dan lanjut kuliah di STHM (Sekolah Tinggi Hukum Militer), sekarang menjadi hakim militer di salah satu Mahmil (Mahkamah Militer) di Indonesia. Saudara perempuan saya bekerja di perusahaan swasta," jelasnya. Sang ayah, I Ketut Suwita adalah bintara polisi saat dirinya masih kecil, dan karena penugas ayahnya, keluarga sering berpindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain, merupakan tantangan karena keterbatasan transportasi saat itu.

Karena ayahnya yang seorang Polisi dan tinggal di asrama Polisi, I Gede Mega tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan dunia Bhayangkara. "Sudah akrab saya dengan dunia polisi karena apa kita tinggal di tangsi, sekarang namanya asrama, jadi rumahnya berdekatan gini satu keluarga masih kecil kalo sekarang tipe 22, tipe 22 itu sudah paling kecil itu," kenangnya. Beranjak remaja, I Gede Mega pindah ke Denpasar pada usia 15 tahun untuk sekolah di SMA 3 Denpasar. Selama masa sekolah, ia yang tidak tinggal bersama orang tuanya harus bisa bertahan hidup karena keterbatasan dana yang dimiliki. "Saya memasak makanan sederhana seperti capcay sendiri



dan mengatur keuangan dengan uang hasil penjualan bahan kebutuhan pokok yang diambil ayah saya dari koperasi. Salah satu teman sekolah saya, Pak (Mayor Jenderal Marinir) Ipung, cuma masalahnya ga serumit saya hidupnya karena dia orang situ, anak kolong" ungkapny.

Setelah lulus SMA, ayahnya menyarankan untuk mendaftar ke Akabri. Mengingat kondisi keuangan keluarga yang terbatas dan status pangkat ayah yang rendah, beliau mengikuti saran tersebut meskipun awalnya berpikir akan mendaftar di Secaba. Persiapan pendaftaran termasuk menyiapkan surat lamaran, belajar psikologi, dan melakukan latihan fisik, dan memeriksa kesehatan, seperti varises dan gigi, atas saran kenalan ayahnya yang paham masalah kesehatan. "Akhirnya daftarlah kita disitu syukur berangkat ke Magelang nggak balik lagi, langsung masuk tahun 1987, lulusnya tahun 1990," tuturnya.

Setelah menempuh pendidikan kepolisian dan menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda), I Gede Mega, telah berkomitmen untuk siap ditempatkan di mana saja, tanpa pernah meminta penempatan khusus. Tugas pertamanya adalah di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara (Polda Nusra), yang kemudian dilikuidasi dan terbagi menjadi empat Polda, yaitu Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polda Timor Timur.

"Penugasannya pertama di Bali, pulang kampung sekitar 5 tahun, lalu kemudian setelah dari bali, saya dapat penugasan Timor-



Timur beberapa bulan saja mungkin sekitar tujuh bulanan,” ujarnya.

Pada tahun 1997 saat menyandang pangkat Ajun Komisaris Polisi, I Gede Mega kembali menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK). “Karena saya liat PTIK itu ada S2-nya, waktu itu kerja sama dengan UI yang mengelola S2-nya, saya lihat ini kalau kita sekolah bagus juga nih, dari pada kita sekolah di luar lebih baik sekolah disini kita bisa belajar beneran pikiran saya gitu, apalagi waktu itu ada desas-desus, ada berita-berita yang belum akurat bahwa yang tamatan KIK itu disetarakan jadi ga perlu ikut Sespim katanya begitu semakin semangat saya” jelasnya diiringi gelak tawa. Setelah menyelesaikan pendidikan master di bidang Kajian Ilmu Kepolisian, I Gede Mega, ditugaskan di Direktorat Lalu Lintas dan mendapat kepercayaan menjabat sebagai Kasubbag Pers Bagmin Ditlantas.

Setelah dua tahun berselang, I Gede Mega dipindahkan ke Jawa Timur; menjabat Kasubbag Lantas Polwil Bojonegoro selama enam bulan, kemudian di Banyuwangi selama tiga tahun sebagai Wakapolres, dan sebagai Kabag Ops Poltabes Surabaya. Berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, I Gede Mega mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri pada tahun 2008.

Setelahnya I Gede Mega ditugaskan di Polda Nusa Tenggara Timur mengisi sebagai Kasat I Dit Intelkam kemudian Kasubdit I Dit Intelkam. “Tahun pertama belum jadi Kapolres, tahun kedua katanya harus susjab (kursus jabatan) dulu, setelah susjab nunggu lagi, akhirnya setelah sekian tahun di sana, tahun keempat atau ke kelima selesai susjab baru jadi Kapolres,” tutur pria yang telah mendapatkan penghargaan Bintang Bhayangkara Narariya.

Setelah sepuluh tahun bertugas di NTT, I Gede Mega mendapatkan penugasan baru Kabid Propam Polda Kepri. Menghabiskan satu tahun di Kepri hingga akhirnya mengenyam pendidikan di Program Pendidikan Reguler Angkatan 60 Lemhannas RI yang berlangsung saat masa pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran dilakukannya secara

online. Setelah itu, ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Madya Divpropam Polri selama empat bulan. “Setelah itu penempatan di Slog (Staf Kapolri Bidang Logistik) di Cipinang belajar logistik selama satu tahun. Nah setelah setahun disitu dipercaya Karolog di Sumut bertemu Pak (Komjen Pol.) Panca di Sumut, mengabdikan sama beliau selama satu tahun. Terus pindah ke Bali dari, karena saya pikir ini sudah mau pensiun ini dekat dekat rumah aja lah,” jelasnya.

Bagi I Gede Mega dan keluarganya, penting untuk patuh mengikuti aturan yang berlaku di institusi Polri. “Dalam setiap tugas, istri saya selalu terlibat aktif, mengadaptasi tradisi dan kebiasaan yang sudah ada di lingkungan. Mereka (keluarga) tidak selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan; sebaliknya, mereka menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan bermodalkan niat baik.

Bagi I Gede Mega, jika Tuhan membuka jalan, ia dan keluarga bersyukur, tetapi jika tidak, ia percaya bahwa mungkin ada jalan lain yang juga baik. Dirinya mengikuti cara alam semesta bekerja, yang kadang memberikan rintangan sebagai bentuk kebaikan, karena semesta tahu yang terbaik. “Semesta punya aturan main sendiri, kita sudah baik ini, Tapi terkadang semesta ngasi rintangan di depan itu bukan tidak baik, baik juga rintangan itu sebenarnya karna dia yang tau, semesta yang tau,” tutur pria yang memiliki dua orang putri dan satu orang putra.

Berkat kinerjanya yang impresif I Gede Mega, mendapatkan kepercayaan untuk menjadi seorang Perwira Tinggi Polri, dan semenjak April 2024 mengemban tugas sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lemhannas RI. “Saya pikir saya pensiun Kombes lah, ya sudahlah segitu saja cukup. Kan tinggal berapa tahun itu habisnya. Setelah itu masih ada peluang rupanya,” ungkapnya.

Sebagai Karoum Settama Lemhannas RI, I Gede Mega, memandang dirinya sebagai satu roda kecil dalam sistem besar, bertugas melaksanakan fungsi pokok sebaik mungkin untuk memastikan sistem berjalan lancar. Dalam hal pengadaan dan peran PPK, tugasnya adalah mengoptimalkan fungsinya sesuai dengan arahan dan membenahi proses tersebut, namun tidak sendiri, melainkan dengan mengikuti arahan dari pimpinan.

“Saya tidak memiliki visi misi sendiri; saya mendukung visi misi Gubernur yang diturunkan ke Sestama dan kemudian kepada saya,” tegasnya.

Sebagai bagian dari rantai yang lebih besar, I Gede Mega bertindak sesuai arahan dan mendukung inisiatif pimpinan. Salah satu upaya dan terobosannya di Lemhannas adalah lebih banyak pemanfaatan e-katalog. “Saya mengarahkan untuk melakukan pengadaan melalui e-katalog sebagai upaya meningkatkan efisiensi, memudahkan proses, dan menghemat waktu. Namun, jika tidak ada alternatif lain, kami terpaksa menggunakan metode konvensional seperti pengadaan langsung atau tender terbatas, yang memiliki risiko dan memerlukan waktu lebih lama,” ujarnya.

Prinsip utama yang dipegang oleh I Gede Mega, adalah kualitas terbaik. Dari pengalaman sebelumnya sebagai Karolog di Polda Sumut dan Bali, ia memastikan bahwa kualitas tetap terjaga karena sifatnya yang detail dan teliti terhadap kualitas. Sangat penting baginya dan tim untuk memastikan bahwa kualitas layanan memenuhi standar yang diharapkan. Meskipun baru beberapa bulan bertugas di posisi saat ini, I Gede Mega telah meneruskan program dari pejabat sebelumnya dan menekankan pentingnya kualitas karena pengguna langsung merasakan manfaatnya. Ini merupakan tanggung jawab beliau untuk memelihara integritas dan efektivitas di lingkungan kerja. Prinsip kualitas menjadi prioritas, dan prinsip-prinsip lain dalam setiap pengadaan juga dipertimbangkan untuk menghindari kerugian atau penurunan kualitas.

Cara I Gede Mega bekerja adalah implementasi dari motto hidupnya untuk selalu berusaha menjadi baik, bahkan dalam keadaan terburuk. Beliau tidak mengejar pengakuan sebagai yang terbaik, melainkan hanya berusaha menjadi versi baik dari dirinya sendiri. Baginya capaian-capaian yang didapatkan bukan dirinya yang menilai, tapi lingkungan sekitar yang menentukan apakah beliau dianggap berhasil atau tidak, karena ukuran keberhasilan setiap orang berbeda.

Dedikasikan Diri sebagai PNS

Seimbangkan Peran sebagai Istri dan Ibu

Linda Asiri, M.Si. (Han), M.Pd., lahir pada 25 Oktober 1991 dan besar di bilangan Jakarta Selatan. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang budaya beragam; ibunya keturunan Betawi dan Jawa Tengah, sementara ayahnya berasal dari Wonogiri dan merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut.

Linda menghabiskan masa kecilnya di Kalibata, di mana ia bersekolah di taman kanak-kanak dan sekolah dasar negeri. Orang tuanya, mendorongnya untuk mengikuti les bahasa Inggris sejak kelas 3 atau 4 SD, yang kemudian menjadi bekal penting dalam pendidikan dan pengembangan kemampuan bahasa asingnya. Pada masa sekolah dasar, Linda mengikuti pendidikan formal di sekolah negeri pada pagi hari dan di Madrasah pada siang hari. "Jadi pagi sampe siang aku sekolah negeri, terus siang dari jam satu aku sekolah agama gitu, Madrasah si namanya, ijazah ku jadinya ada dua, dari negeri sama dari madrasah," tutur wanita yang memiliki hobi membaca dan traveling.

Setelah lulus dari sekolah dasar, Linda melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 43 Mampang. Pada jenjang pendidikan menengah atas, Linda diterima di SMA Negeri 28 Jakarta dan mengambil jurusan IPA. Di SMA, Linda mulai mengurangi kegiatan kursus bahasa Inggris karena jadwal yang padat. "Alhamdulillah dapat disitu dengan jurusan IPA, di SMA aku nggak kursus lagi, karena jadwal udah padat, paling kalo ekskul paskibra si pas SMP, SMA-nya silat sama Kelompok Ilmiah Remaja sma Rohis (Rohani Islam) juga," tuturnya.

Menjelang kelulusan SMA, Linda bercita-cita menjadi dokter, karena keinginannya untuk membantu orang lain. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai hal, ia akhirnya memilih jalan lain dan mempersiapkan diri untuk menjadi guru bahasa Inggris.

Linda mengikuti Ujian Masuk Bersama (UMB) dan berhasil diterima di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Selama kuliah, Linda mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai kegiatan, termasuk public speaking dan les tari di sanggar Griya Seni, Rawamangun. Selain itu, Linda aktif sebagai sukarelawan di berbagai acara mahasiswa



LINDA ASIRI

Analisis Kerja Sama Subbag Kerma Multilateral
Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Kerjasama
dan Hukum Settago Lemhannas RI

dan mencari pengalaman tambahan dengan mengajar les privat serta menjadi instruktur freelance di lembaga kursus, seperti LPIA, ILP di Cikini, dan English Club di Al-Azhar Rawamangun, tempat ia mengajar anak-anak TK, SD, dan SMP. Linda menyelesaikan pendidikannya hingga tahap Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan berhasil lulus S1 dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat lulusan terbaik.

Setelah lulus, orang tua Linda menyarankan agar ia melanjutkan ke jenjang S2, dan Linda pun mencari program yang menyediakan beasiswa. Saat mengajar di Jakarta Utara, ia melihat spanduk Universitas Pertahanan (Unhan) yang menawarkan beasiswa, mendaftar dan memilih jurusan Manajemen Bencana. Namun, karena nilai akademiknya yang tinggi, pihak Unhan menyarankan agar Linda pindah ke jurusan Manajemen Pertahanan. "Sebenarnya aku jurusannya Manajemen Bencana, kemudian ditelpon dibilang jurusannya Manajemen Pertahanan karena nilai tinggi jadi masuknya defense management, karena nanti dosen-dosennya dari Cranfield University yang di datangkan ke Indonesia," tuturnya.

Sambil menjalani studi S2, Linda juga mencari pekerjaan sebagai dosen. Ia diterima sebagai dosen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Bahasa Inggris di Universitas Indonesia (UI) setelah melalui proses seleksi dan microteaching. Di samping mengajar di UI, Linda menerima tawaran mengajar di SMP Al-Azhar Rawamangun selama tiga hari seminggu, sementara sisa waktunya ia habiskan di UI. Di samping itu, Linda juga mengajar sebagai dosen freelance. "Di UI itu sampai aku nikah sekitar 2016 masih ngajar, 2017 udah ngga ngajar, terus di Kalbis (Kalbe

Institute) sama freelance juga disitu hari sabtu ngajar, hari biasa juga ngajar, di Kalbis juga mengajar," ungkapny.

Menyadari pentingnya kelinieran pendidikan untuk menjadi dosen dan guru, Linda kemudian memutuskan untuk menempuh S2 yang kedua di bidang Pendidikan Bahasa Inggris di Unindra agar lebih relevan dengan profesi pendidik. Pilihan ini juga didorong oleh keyakinannya bahwa gelar yang linear akan meningkatkan penghasilannya saat berkarir sebagai PNS. Linda juga melihat bahwa profesi PNS menawarkan stabilitas dan jenjang karir yang lebih luas, serta dukungan dari orang tuanya, terutama almarhum ayahnya, yang sangat menganjurkannya. "Sebenarnya waktu itu PNS pengennya guru si tapi ga ada, pendidikan bahasa Inggris itu cuma dua di Jakarta, Lemhannas dan Kemenko Marves. Nah aku taunya dosenku S2 ada yang pernah mengajar di Lemhannas juga, jadi aku pilihnya Lemhannas," ujar wanita yang memiliki gelar master di bidang pertahanan dan pendidikan.

Perjalanan karir Linda sebagai PNS dimulai dengan jabatan sebagai Pengelola Dokumen Perjalanan Luar Negeri, di mana ia mengurus dokumen seperti visa dan paspor bagi pejabat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketika dipromosikan menjadi Analis Kerja Sama, cakupan tugasnya semakin luas, termasuk seleksi administrasi peserta dari negara sahabat dan penerimaan kunjungan kerja sama internasional di Biro Kerja Sama. Linda juga sering dipercaya sebagai Master of Ceremony (MC) untuk berbagai acara kunjungan luar negeri dan kuliah umum di Lemhannas, sebuah tugas yang awalnya ia mulai saat mengajar di Al-Azhar dan kini semakin sering ia lakukan.

Linda memegang prinsip penting dalam hidupnya, yaitu, "Life in this world is temporary; the eternal life is in the hereafter." Prinsip ini semakin menguat setelah kepergian ayahnya secara tiba-tiba setelah pandemi. Peristiwa tersebut mengajarkannya untuk menghargai waktu dan menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Sebagai abdi negara, Linda berkomitmen melayani masyarakat dengan integritas, profesionalisme, inovasi, dan kerja sama, sesuai dengan doa ayahnya agar ia berguna bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, serta bangsa dan negara.

Meski Linda mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada tugas sebagai PNS, ia tetap menyeimbangkan peran sebagai istri dan ibu. Di tengah kesibukannya, Linda selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Bagi Linda, kedekatan dengan anak-anak adalah prioritas. Setiap sore sepulang kerja, ia melanjutkan rutinitas dengan mengajari mereka belajar, sambil mengajarkan tahfidz juz 30 dan sering melakukan tadarus serta murojaah bersama. "Waktu-waktu ini sangat berharga, membuat saya merasa lebih dekat dan terlibat dalam perkembangan mereka," ujarnya. Ia bersyukur, terutama di masa pandemi, karena kesempatan untuk menjalani rutinitas yang lebih seimbang, di mana Linda dapat mengisi hari-harinya dengan peran yang lengkap sebagai ibu, istri, dan pegawai yang berdedikasi.

Setiap hari, Linda memulai rutinitasnya pukul tiga pagi. Ia bangun untuk beribadah, mempersiapkan diri, dan memasak bekal untuk anak-anak sebelum mengantarkan mereka ke sekolah dan berangkat ke kantor. Baginya, pagi adalah waktu paling produktif, saat ia bisa mempersiapkan segala hal dengan tenang untuk keluarganya. "Pekerjaan mungkin menuntut banyak, tapi keluarga tetap jadi tempat pertama saya ingin berikan yang terbaik," katanya.

Ke depannya, Linda memiliki harapan besar untuk kontribusinya di dunia kerja sama internasional. Ia ingin memperluas jalinan kerja sama baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian program luar negeri sudah berjalan, dan banyak kerja sama dalam negeri telah terjalin hingga kini. Namun, Linda bercita-cita untuk memperluas peran institusinya tidak hanya sebagai penerima kunjungan, tetapi juga dengan inisiatif untuk melakukan kunjungan balik ke negara sahabat. "Saya berharap langkah-langkah ini dapat memperkuat hubungan dan manfaat kerja sama yang telah terjalin, serta membuka peluang baru untuk kemajuan bangsa," ujarnya dengan penuh optimisme.





Indonesia Mitra Potensial Baru BRICS

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia yang berlangsung pada 22 s.d. 24 Oktober 2024 lalu. Indonesia telah menyampaikan keinginan untuk bergabung sebagai anggota blok ekonomi BRICS.

“Saya sampaikan bahwa Indonesia siap bergabung dalam BRICS. Indonesia siap dukung upaya BRICS majukan kepentingan Global South,” kata Menlu RI, Sugiono dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia pada hari Kamis (24/10).

Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan bentuk dari penerapan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Keinginan Indonesia untuk bergabung bukan hanya untuk ikut-ikutan. Sikap Indonesia menerapkan bebas aktif dalam hubungan internasional telah ditekankan dalam sejumlah forum.

Sugiono menekankan pentingnya peran Indonesia dalam tatanan global bahwa melihat potensi besar dalam kemitraan strategis dengan BRICS. Indonesia selalu menempatkan diplomasi ekonomi sebagai prioritas dan bergabung dengan BRICS bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan politik global.

Dengan pengumuman keinginan tersebut, status Indonesia saat ini adalah telah menjadi Interested Country atau negara yang berminat bergabung. Indonesia sebelumnya telah diakui sebagai

salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Selain Indonesia, 12 negara lainnya adalah Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Mitra BRICS hanya diperbolehkan terlibat dan berpartisipasi secara selektif dalam urusan BRICS. Mereka tetap menjadi peserta dalam inisiatif internasional, tetapi tanpa komitmen penuh terhadap blok tersebut.

Sugiono menambahkan bahwa Indonesia percaya BRICS dapat mengedepankan hak pembangunan bagi negara berkembang, mendukung reformasi sistem multilateral, dan menjadi kekuatan pemersatu Global South.

Bergabung dengan BRICS akan memberikan sejumlah manfaat strategis bagi Indonesia, akan memperkuat posisi Indonesia di panggung Internasional serta memiliki akses New Development Bank (NDB) untuk rencana besar Indonesia sebagai lima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045.

Selain peluang ekonomi, BRICS juga merupakan platform penting untuk inovasi dan pengembangan teknologi. Negara-negara anggota BRICS telah dikenal sebagai pionir dalam berbagai sektor, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan pengembangan infrastruktur.

Selain itu, memberikan Indonesia lebih banyak kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan global, terutama terkait isu-

isu yang penting bagi negara-negara berkembang, seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama bilateral.

Namun, ada tantangan yang harus dihadapi Indonesia jika bergabung dengan BRICS. Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat dengan negara-negara Barat dan bergabung dengan BRICS bisa mempengaruhi keseimbangan hubungan tersebut. Meski ada tantangan, Menlu RI menegaskan bahwa prospek Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tetap menjanjikan.

“Kami akan memastikan bahwa setiap keputusan mengenai hubungan internasional, termasuk potensi bergabung dengan BRICS akan selalu mempertimbangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS dinilai dapat memberi manfaat bagi Indonesia, khususnya dalam aspek ekonomi. BRICS dapat membuka potensi pasar baru bagi ekonomi dan industri Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, dan memuluskan upaya Indonesia meneken perjanjian bilateral. Dalam jangka panjang, keanggotaan BRICS dapat membantu Indonesia mengamankan posisi sebagai kekuatan ekonomi global sekaligus memperkuat daya saing internasional.

Sumber: Berbagai Sumber

● HOT NEWS

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikisaintek), Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyampaikan bahwa Alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang belajar di luar negeri tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdikan. Namun, alumni diberikan kesempatan untuk berkarya di mana saja setelah mereka lulus.

Seperti diketahui sebelumnya, selama ini memang aturannya adalah penerima beasiswa harus kembali ke Indonesia dan diharapkan dapat berkontribusi secara langsung bagi negara. Namun, kondisi di dalam negeri saat ini dirasa belum cukup optimal dalam menyediakan peluang bagi alumni sesuai bidangnya masing-masing.

"Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Prof. Satryo di Kantor Kemenko PMK,

Jakarta, Selasa (5/11/2024) dikutip dari Antara News. Alumni penerima beasiswa LPDP didorong untuk memiliki prestasi yang bagus meskipun memilih bekerja di luar negeri. Mereka bisa bekerja di perusahaan besar, melakukan penelitian di laboratorium yang canggih, maupun menemukan inovasi sesuai bidangnya. Ke depannya, prestasi mereka akan tetap bisa dibilang prestasi orang Indonesia. "Meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih," lanjut Prof Satryo.

Kendati demikian, pihaknya akan terus mengupayakan sinergi untuk membangun industri dalam negeri yang nantinya dapat mempertimbangkan keahlian dan latar belakang pendidikan lulusan LPDP dari perguruan tinggi luar negeri.

Sementara, Prof Satryo mengingatkan para pegawai ASN penerima beasiswa LPDP yang belajar di luar negeri, mereka harus kembali pulang ke Indonesia untuk bekerja dan

menyumbangkan ilmunya untuk kemajuan Indonesia melalui instansinya masing-masing.

"Jadi, intinya kalau mereka yang awalnya dari instansi, harus pulang. Selama mereka adalah pegawai dari institusi pemerintahan yang ada di Indonesia, kemudian disekolahkan keluar untuk kembali lagi atau tugas belajar ya itu harus pulang," imbuh Satryo selepas rapat kerja perdana bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (6/11/2024).

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, Prof Satryo juga mengatakan bahwa program beasiswa dari LPDP akan disesuaikan dengan program Presiden Prabowo Subianto.

"LPDP memang dalam proses untuk penataan kembali, memastikan bahwa program LPDP itu menunjang program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo," kata Satryo dalam rapat tersebut dikutip dari Kompas.

Program pemerintah tersebut di antaranya adalah swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi yang akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Selain itu, pendanaan studi dari LPDP juga akan fokus pada bidang sains dan teknologi. Sehingga jika ada bidang studi yang sesuai dan layak untuk dikembangkan, akan didukung berupa bantuan dana. Jumlah penerima beasiswa LPDP juga direncanakan akan meningkat setiap tahunnya.

Kemudian, Prof Satryo juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak menganggap tawaran beasiswa perguruan tinggi luar negeri seperti program LPDP merugikan, karena investasi di bidang pendidikan tidak pernah merugikan.

"Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak.

Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?" imbuhnya.

Sumber: Berbagai Sumber

Alumni LPDP Bebas Berkarya Dimana Saja



Foto.Unsplash



Ponot

Air Terjun Tertinggi di Indonesia

Foto: asahankab.go.id

Salah satu tujuan wisata andalan di Sumatera Utara adalah Air Terjun Ponot yang terletak di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan. Air terjun ini merupakan satu dari sekian banyak air terjun yang terkenal di Sumatera Utara selain Sipiso-piso dan Sigura-gura. Ketiga air terjun tersebut bersumber pada Sungai Asahan yang juga merupakan sumber utama dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan.

Istimewanya, Ponot menyandang predikat sebagai air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 250 meter dan tersusun atas tiga tingkatan yang semakin menambah pesona keindahannya.

Air terjun ini berasal dari Sungai Ponot yang mengalir tenang di antara perbukitan hijau di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Aliran dari Air Terjun Ponot juga menciptakan sungai-sungai kecil di sekitar telaga dari titik jatuhnya air. Aliran air yang dihasilkan oleh air terjun ini ketika debit airnya tinggi akan menghasilkan kabut tipis di sekitarnya. Ini membuat udara di sekelilingnya menjadi lebih sejuk.

Untuk mencapai Kawasan wisata ini, pengunjung bisa melakukan perjalanan

dari ibu kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Kota Porsea di Kabupaten Tobasa merupakan titik terdekat untuk mencapai lokasi air terjun ini selain Rantau Parapat (Kabupaten Simalungun) dan Pematang Siantar (Kabupaten Simalungun). Meski perjalanan yang ditempuh dari Medan cukup lama, pengunjung tidak akan merasa bosan karena perjalanan ini sendiri sudah menjadi sebuah petualangan yang terlupakan sebagai wisata alam menyusuri bagian Sumatra termasuk panorama sekitar Danau Toba.

Sebuah gerbang besar menandai pintu masuk ke air terjun Ponot yang sudah terlihat dari kejauhan. Pengunjung harus menyusuri jalan setapak sejauh 500 meter dan sedikit menanjak. Tepat di sisi jalan setapak menuju telaga air terjun terdapat anak sungai yang dipenuhi bebatuan besar. Aliran air yang sangat jernih dan sejuk ini merupakan sebuah sarana healing yang sangat memesona.

Semakin jauh kita menyusuri jalan setapak hingga ke ujung, air terjun terlihat semakin jernih dan alirannya menghantam dinding tebing yang curam hampir tegak lurus. Jalan setapak ini berakhir ketika kita menemukan tumpukan batu-batu alam besar dan sedikit licin. Kita harus lebih berhati-hati dalam berjalan agar bisa mencapai

titik tertinggi menuju kolam air terjun. Namun tidak disarankan untuk berenang karena bebatuan di sekitar kolam sangat licin.

Di kawasan air terjun ini sudah banyak dibangun warung-warung permanen tak jauh dari tempat parkir kendaraan pengunjung. Suasana di sekitar air terjun sangat asri dan terjaga. Pengunjungnya pun tidak hanya dari warga lokal saja, namun banyak juga dijumpai turis mancanegara, meski jumlahnya masih sangat sedikit.

Demi menarik lebih banyak pengunjung, Pemerintah Kabupaten Asahan pada 10 Agustus 2024 lalu menggelar pengibaran 200 bendera Merah Putih di sekitar destinasi wisata Air Terjun Ponot. Seperti dikutip dari situs Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, kegiatan ini juga sebagai sarana promosi Air Terjun Ponot dan bagian dari program pariwisata.

Tak hanya itu, Kabupaten Asahan yang memiliki garis pantai sepanjang 85 km ini merupakan pintu masuk yang strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional sekaligus salah satu jalur terpadat di dunia.

Sumber: Berbagai Sumber

Larungan Ponorogo

Ketika Kepercayaan dan Alam Bersatu

Di balik keindahan alam Telaga Ngebel yang terletak sekitar 30 kilometer dari pusat kota Ponorogo, Jawa Timur, terdapat sebuah tradisi sakral yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat setempat, yaitu Larungan. Diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Suroan untuk menyambut tahun baru Islam, 1 Muharram (1 Suro dalam penanggalan Jawa).

Larungan sendiri berasal dari kata 'larung,' yang berarti 'menghanyutkan' atau 'melarutkan.' Dalam konteks ritual, Larungan merujuk pada prosesi penghanyutan sesaji ke laut atau sungai sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan kekuatan alam yang diyakini memiliki kekuasaan atas nasib manusia.

Bagi masyarakat Jawa, khususnya Ponorogo, air adalah elemen penting yang melambangkan kesuburan, kehidupan, dan pembersihan spiritual. Telaga Ngebel sebagai salah satu sumber air terbesar di kawasan ini, diyakini sebagai tempat yang suci dan sering dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur.

Setiap tahun, ritual Larungan selalu menarik perhatian masyarakat setempat

maupun pengunjung dari luar daerah. Sebelum hari pelaksanaan misalnya, masyarakat di sekitar Telaga Ngebel bekerja sama untuk menyiapkan sesaji. Sesaji yang disiapkan berupa tumpeng, hasil bumi, buah-buahan serta aneka makanan khas Ponorogo. Semua ini disusun dengan indah dan rapi dalam wadah tradisional dan nampun.

Sebelum sesaji dihanyutkan ke tengah telaga Ngebel, diadakan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Doa ini adalah bentuk permohonan kepada Tuhan agar masyarakat Ponorogo diberikan keselamatan, rezeki yang melimpah serta dijauhkan dari segala bencana dan malapetaka. Dalam prosesi ini, suasana menjadi sangat sakral dengan aroma dupa yang menyebar di udara.

Setelah doa dipanjatkan, sesaji kemudian dihanyutkan ke tengah Telaga Ngebel. Dalam prosesi ini, sesaji biasanya diletakkan di atas sebuah rakit kecil yang dihias dengan janur, kemudian didorong menuju tengah danau. Air telaga dianggap sebagai media yang dapat menyampaikan permohonan kepada alam semesta dan Sang Pencipta.

Prosesi ini biasanya diiringi dengan

musik gamelan dan tembang-tembang Jawa yang menambah suasana sakral. Selain sesaji, masyarakat juga melepaskan binatang hidup, seperti ayam atau kambing sebagai bagian dari persembahan. Pelepasan ini memiliki makna simbolis sebagai penyerahan nasib manusia kepada alam dan kekuatan yang lebih besar. Moment ini menjadi puncak dari ritual, di mana masyarakat berharap hubungan harmonis dengan alam dan leluhur tetap terjaga.

Ritual Larungan biasanya ditutup dengan acara syukuran, masyarakat berkumpul untuk makan bersama, menikmati sesaji yang telah diberkati. Syukuran ini juga menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan antarwarga sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas segala berkah yang telah diterima.

Ritual Larungan bukan hanya sekadar tradisi adat, tetapi juga merupakan cerminan dari filosofi hidup masyarakat Ponorogo yang menghormati keseimbangan antara alam, manusia, dan Tuhan. Melalui Larungan, mereka menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam, terutama air yang menjadi sumber kehidupan utama di Telaga Ngebel.

Sumber: Berbagai Sumber



Foto.ponorogo.go.id

Kolonel Marinir Rommy Hutagaol, M. Han., M.Tr. Opsla

Tetap Semangat dan Jangan Pernah Menyerah, Karena Segala Usaha pasti akan menghasilkan keberhasilan

Sungguh membanggakan dan membahagiakan bagi Kolonel Marinir Rommy Hutagaol, M. Han., M.Tr. Opsla., mengingat dirinya berhasil menjadi peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 67 yang mendapatkan predikat Kertas Ilmiah Karya Perseorangan (Taskap) terbaik.

Pencapaian Rommy Hutagaol didapatkan berkat rangkain usahanya yang maksimal dalam menghasilkan Taskap yang berkualitas, holistik, komprehensif dan memiliki dampak yang luas bagi kebijakan pemimpin tingkat nasional. Dimulai dengan pemilihan judul yang akan diangkat. Setelah menentukan judul, ia mengajukan proposal pada seminar dan mulai menulis.

Topik yang diangkat oleh Rommy Hutagaol dalam Taskapnya terkait masyarakat di desa pesisir yang sering kali dipandang kurang, terbelakang, dan kumuh. Menurutnya hal tersebut adalah paradoks melihat Indonesia adalah penghasil ikan nomor dua di dunia setelah China. "Padahal hasil dari perikanan dari kelautan itu meningkat, tapi nyatanya penduduknya itu masyarakat pesisirnya tidak serta merta ikut sejahtera. Masyarakat pesisir-pesisirnya seperti itu dari segi kesehatan maupun perekonomian," jelasnya.

Sepanjang proses pengerjaan Taskap, Rommy Hutagaol mengaku menghadapi banyak rintangan dan kendala, terutama karena waktu yang sangat terbatas; ia tidak memiliki kebebasan untuk mewawancarai narasumber seperti dalam penelitian normal. "Kalau kita penelitian secara normal kita punya waktu luang untuk melaksanakan penelitian tersebut, mewawancarai narasumber-narasumber, kalau ini kan kita tidak punya waktu itu. Tapi luar biasa karena tutor pendamping saya kebetulan Deputy Pendidikan, mengarahkan saya dengan baik sehingga bisa menghasilkan yang terbaik," ungkapnya.

Kegigihannya dalam menempuh pendidikan di Lemhannas RI berangkat dari semangat belajar yang telah lama ada dalam diri Kolonel Hutagaol. Menurutnya masih banyak yang belum diketahuinya. Motivasi utamanya adalah keluarga dan satuan tempat ia bertugas. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, ia yakin dapat mencapai yang terbaik. Meskipun jarang bagi anggota TNI, khususnya Marinir, untuk mendapatkan prestasi di level pendidikan tertinggi, ia telah membuktikan bahwa hal itu dapat dilakukan, meskipun bukan target utamanya.

Selama ini, Rommy Hutagaol hanya belajar di lingkup TNI, khususnya tentang operasi militer. Namun, pendidikan di Lemhannas RI telah membuka wawasannya tentang cara kerja dan kinerja kementerian dan lembaga, sehingga jika suatu saat ia tidak lagi di TNI, ia bisa berkontribusi di kementerian atau lembaga dengan modal pengetahuan yang telah ia miliki. Baginya, Lemhannas RI memberikan pengalaman yang luar biasa. Tidak ada alasan untuk kecewa bisa berdinasi di sini. Tugasnya mulia, yaitu mengantarkan calon-calon pemimpin nasional ke depan. Oleh karena itu, Kolonel Hutagaol tetap semangat karena ia pasti akan merasa bangga apabila melihat mantan anak didiknya berada di level pimpinan di masa depan. Pesannya, "Tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena segala usaha pasti akan menghasilkan keberhasilan," pungkasnya.



Brigjen TNI Aditya Nindra Pasha

Mulai Berpikir dalam Skala Nasional, dengan Mempertimbangkan Kepentingan Strategis Nasional

Brigjen TNI Aditya Nindra Pasha, S.E., M.M. adalah peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 67 Lemhannas RI yang mendapatkan predikat Akademik Terbaik. Aditya Nindra Pasha merasa puas dan bahagia atas capaiannya karena telah meraih prestasi yang membanggakan setelah menempuh tujuh bulan pendidikan di Lemhannas RI. Namun, dirinya mengakui bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Tanpa dukungan penuh dari seluruh rekan peserta PPRA 67, Aditya Nindra Pasha merasa tidak akan bisa mencapai titik ini. "Setiap individu berkontribusi, setiap orang berbagi visi yang sama, dan semua memiliki semangat yang selaras. Saya hanya merupakan wakil dari mereka semua, dimana seluruh PPRA 67 bekerja bersama untuk maju dan berkembang sebagai satu kesatuan," jelasnya.

Semangat yang dimiliki Aditya Nindra Pasha saat menjalani pendidikan PPRA 67 didorong oleh motivasi yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI saat pembukaan pendidikan: 'Menuntut ilmu itu penting, tetapi poin utama dari pendidikan ini adalah bagaimana kita memperkuat atau memperluas jaringan kita dan menjalin silaturahmi.' Semangat tersebut mendorongnya tidak hanya mencari teman, tetapi juga untuk memperluas jaringan dan mencari kolega, sambil tetap menuntut ilmu. "Bagi saya, menjalankan pendidikan ini dengan penuh rasa gembira dan menyenangkan adalah kunci untuk tetap bersemangat," ungkap pria kelahiran 9 Juli 1973 ini.

Pencapaiannya tidak terlepas dari metode belajar yang diterapkan oleh Aditya Nindra Pasha. Menurutnya, terpenting adalah memanfaatkan, memperhatikan, dan memahami setiap materi pelajaran di kelas. Dengan cara ini, beliau dapat menyerap materi yang disampaikan oleh para tutor dan pengajar. "Setelah kembali ke mes,

saya meluangkan waktu untuk membaca kembali apa yang telah disampaikan, cara ini sangat efektif; ketika berada di kelas, fokus untuk menyerap informasi sebanyak mungkin. Dengan demikian, saya sudah memiliki garis besar materi yang diajarkan," tuturnya.

Selama melaksanakan pendidikan, Aditya Nindra Pasha tidak merasa ada tantangan dan hambatan yang berarti. Menurutnya fasilitas dan sarana prasarana yang disediakan Lemhannas RI sangat memadai, jauh berbeda dengan pengalaman beliau selama pendidikan di TNI, mulai dari Selapa, Seskoad, hingga Sesko TNI. Sarana prasarana dan dukungan dari Lemhannas RI telah memungkinkan para siswa atau peserta untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan nyaman, sehingga beliau tidak merasa ada tantangan yang berarti. Namun, beliau tetap harus siap menghadapi perkembangan zaman dan memahami pelajaran-pelajaran baru yang diterima.

Yang utama adalah bagaimana beliau merubah pola pikir dan memperluas visi dalam menghadapi suatu permasalahan. "Selama ini mungkin berpikir secara sektoral, tetapi sekarang harus mulai berpikir dalam skala nasional, dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional. Kita juga perlu memperkaya sudut pandang dari berbagai aspek dan dengan cara tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Tentu saja, ini juga mencakup

menguatkan nilai-nilai kebangsaan bagi kita semua," tambahnya.

Aditya Nindra Pasha juga menyampaikan mungkin sudah waktunya Lemhannas RI membuka pintu bagi siswa asing yang tidak biasa kita terima. Selama ini, peserta yang kita terima kebanyakan dari Asia, Amerika, dan Australia. "Mengapa tidak kita coba mengundang siswa dari Eropa Timur atau dari negara-negara lain yang selama ini belum pernah terlibat? Tujuannya jelas: untuk memperluas dan menambah wawasan kita, sehingga akan ada interaksi yang berarti antara peserta Indonesia dengan peserta dari luar negeri, yang pasti akan memperkaya pengetahuan kita untuk menghadapi perkembangan zaman yang akan datang," pungkasnya.





1



2

1

Sekretaris Utama Lemhannas RI Menjadi Pembicara dalam Talkshow WAwasan Kebangsaan yang bekerja sama dengan TVRI Jawa Tengah pada Selasa (8/10)

2

Pengkajian Strategik Lemhannas RI bersama dengan Direktur Operasi dan Produksi ANTAM Hartono bertolak ke Australia pada (1/10) dalam rangka pendalaman Kajian "Optimalisasi Tata Kelola Lebur Cap dan Jasa Pemurnian Logam untuk Mengamankan Penguasaan Aset Mineral dalam Rangka Menguatkan Kedaulatan Sumber Kekayaan Alam Nasional".

3

Penyambutan Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si di Lemhannas RI pada Selasa (22/10)



3



4

4 Nyonya Rita Ace Hasan Sadzily menerima memorandum Ketua Persatuan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI dari Plt. Perista Lemhannas RI Nyonya Atiek Eko Margiyono. Selasa (22/10)



5

5 Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. pada Kamis (24/10)



6

6 PPRA 67 Tahun 2024 resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si di Ruang Dwi Warna Purwa, pada Selasa (29/10)

7 Gubernur dan Sekretaris Utama Lemhannas RI hadir pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Kamis (07/11)

8 penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Lemhannas RI dengan sejumlah pihak pada Rabu (13/11)

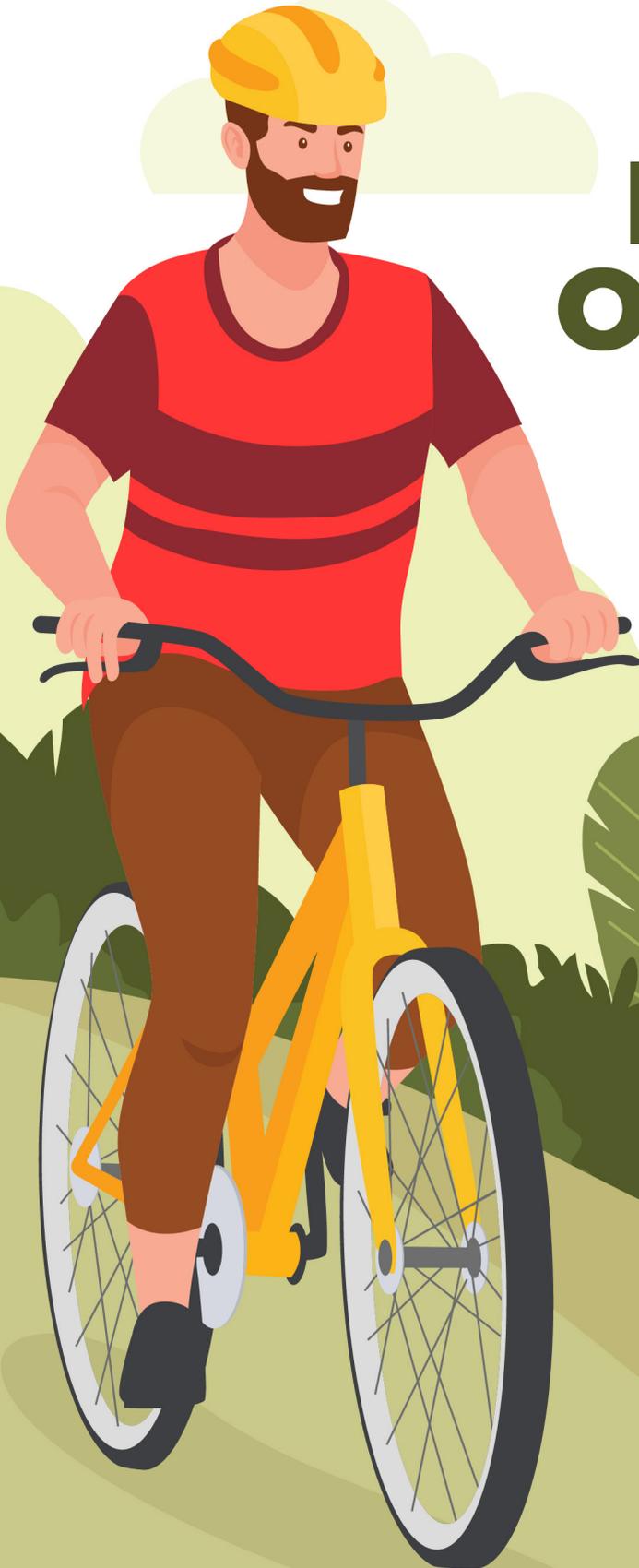
9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI pada Senin (2/9)





SEHAT DENGAN OLAHRAGA

SENGSARA
DENGAN
NARKOBA



#MenujuIndonesiaBersinar



- LEMHANNAS RI MENGUCAPKAN -

Selamat Natal

25 Desember 2024

dan Tahun Baru 2025

